

SKRIPSI

TATA KELOLA KEUANGAN DESA BERBASIS APLIKASI
SISKEUDES DI DESA GARING KECAMATAN TOMPOBULU
KABUPATEN GOWA



Oleh:

NURIFKA INDRIANI

Nomor Induk Mahasiswa : 105641108417

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2024

SKRIPSI

**TATA KELOLA KEUANGAN DESA BERBASIS APLIKASI
SISKEUDES DI DESA GARING KECAMATAN TOMPOBULU
KABUPATEN GOWA**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.Ip)



Disusun dan Diajukan Oleh :

NURIFKA INDRIANI

Nomor Induk Mahasiswa : 105641108417

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tata kelola Keuangan Desa Berbasis Aplikasi
Siskuedes di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kab.
Gowa

Nama Mahasiswa : Nurifka Indriani

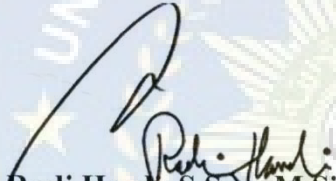
Nomor Induk Mahasiswa : 105641108417


Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

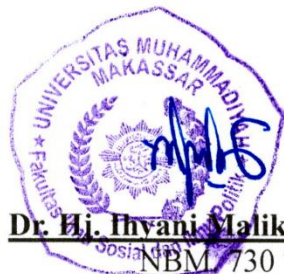

Rudi Hardi, S.Sos., M.Si

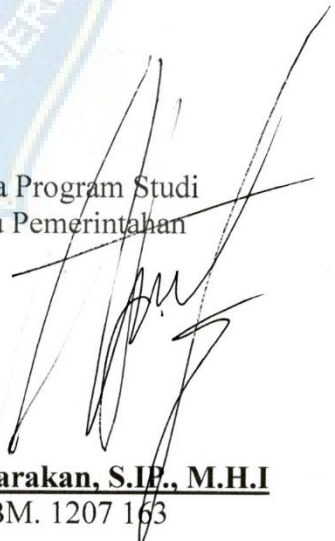

Nur Khaerah, S.IP., M.IP.

Mengetahui:

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan




Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I
NBM. 1207 163

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah di terima oleh Tim penguji Skripsi fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah makassar berdasarkan Surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0234/FSP/A.4II/II/45/2024 sebagai salah satu syarat meyelesaikan program studi dan memperoleh gelar sarjana dalam program studi Ilmu Pemerintahan yang di laksanakan di makassar pada hari selasa tanggal 20 bulan february tahun 2024.

Mengetahui:

Dekan

Sekretaris



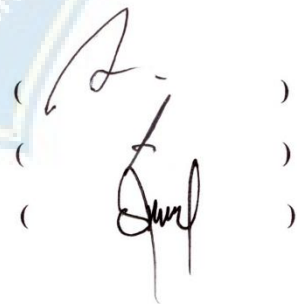
Dr. Hj. Ihvani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 730 727



Dr. Andi Lunur Prianto, S.IP., M.Si
NBM. 999 797

Tim Penguji:

1. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd
2. Muhammad Amril Pratama P, S.IP, M.Si
3. Nursaleh Hartaman, S.IP, M.IP



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Nurifka Indriani
Nomor Induk Mahasiswa : 105641108417
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar Skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 12 Februari 2024

Yang Menyatakan,

Nurifka Indriani

ABSTRAK

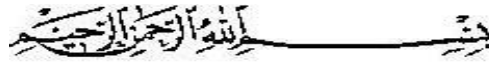
NURIFKA INDRIANI. 2024. Tata Kelola Keuangan Desa Berbasis Aplikasi SISKEUDES di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa (dibimbing oleh Rudi Hardi dan Nur Khaerah).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan mengetahui apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam tata kelola keuangan desa berbasis SISKEUDES di desa Garing kecamatan Tompobulu kabupaten Gowa. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan pegawai kantor desa, kepala desa, dan petugas sistem SISKEUDES, serta studi dokumentasi terkait regulasi dan kebijakan yang berkaitan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa transparansi yang diwujudkan pemerintah desa Garing pada pelaporan keuangan aplikasi SISKEUDES telah melibatkan masyarakat, untuk akuntabilitas SISKEUDES dalam hal pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa dilakukan secara fisik, untuk partisipasi dalam penggunaan aplikasi Siskeudes telah melibatkan seluruh elemen masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat sangat mendukung adanya penggunaan aplikasi Siskeudes dan melibatkan masyarakat dalam sosialisasi, dan untuk faktor pendukung dalam penggunaan aplikasi Siskeudes memungkinkan masyarakat untuk melihat dan memantau secara real time bagaimana penggunaan dana desa itu tepat sasaran serta kekurangan dalam penggunaan teknologi lainnya aplikasi tersebut memiliki beberapa kekurangan seperti jaringan yang kurang memadai.

Kata Kunci : Tata Kelola Keuangan, Sistem Aplikasi SISKEUDES di Desa Garing kecamatan Tompobulu kabupaten Gowa

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur, penulis haturkan dan panjatkan atas kehadiran Allah SWT, sang pencipta yang telah melimpahkan rahmat dan hinayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tata Kelola Keuangan Berbasis Aplikasi Siskuedes di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa”**.

Berbagai pihak yang telah memberikan semangat, dukungan dan bantuan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini, maka dari itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Kepada Ayahanda Prof. H. Ambo Asse M.Ag selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
2. Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos. M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
3. Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan yang juga telah membantu peneliti dan telah membina jurusan ini dengan baik.
4. Ayahanda Rudi Hardi, S.Sos., M.Si selaku pembimbing I dan Kakanda Nurkhaerah, S.IP., M.IP selaku Pembimbing II yang tak kenal lelah memberikan bimbingan, mengarahkan, mengoreksi, serta selalu mendorong dan membantu untuk memberikan semangat penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Staf Tata Usaha Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Terima Kasih Untuk Kedua Orang Tua saya Bapak H. Makmur, S.Pd.i dan Ibunda Hj ST Nurhayati, S.Pd.i, kakak pertama Sukaeni, S.Pd kakak kedua saya Zulhana, S.st serta segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moril maupun materil.

7. Segenap pemerintah desa Garing dan tokoh masyarakat yang telah membantu dan memberikan informasi dalam penyelesaian penelitian.
8. segenap keluarga besar himpunan mahasiswa jurusan ilmu pemerintahan (himjip)
9. keluarga besar Badan eksekutif Mahasiswa (BEM) fisip terimakasih terutama sepengurusan saya kemarin periode 2020/2021.
10. Beberapa kakanda, letting dan adik-adik di Humaniera terimakasih suport dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluarga besar Pikom Imm fisip terutama keluarga besar SKb V.
12. Teman-teman di humanikom.
13. Terima Kasih untuk letting saya di jurusan sebelah yang tidak bisa ku sebut namanya atas suport dan motivasinya selama pengerjaan skripsi ini.
14. Serta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa dan dukungan.
15. Dan yang terakhir terimakasih kepada diri saya sendiri Kerna telah mampu berjuang sampai akhir.

Akhirnya skripsi ini telah selesai, semoga dan bermanfaat kepada semua pihak baik penulis maupun orang lain, Insya Allah. Semoga mendapat lindungan, berkah, dan karunia dari Allah Swt kepada bapak, ibu serta Saudara (i) atas segala bantuannya. Aamiin Ya Rabbal Aamiin.

*Jazakumullahu Khairan Katsiran
Billahi Fii Sabilil Haq.
Fastabiqul Khaira
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Makassar, 12 Februari 2024

Nurifka indriani

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Teori Dan Konsep.....	11
1. Teori Tata Kelola Keuangan Desa	11
2. Teori UU Desa	15
3. Teori Aplikasi Siskeudes.....	21
C. Kerangka Pikir.....	23
D. Fokus Penelitian	24
E. Deskripsi Fokus Penelitian	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian	26
B. Waktu Dan Jenis Penelitian	26
C. Sumber Data	26
D. Informan Penelitian	27

E. Teknik Pengumpulan Data.....	28
F. Teknik Analisis Data.....	28
G. Pengabsahan Data.....	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Deskripsi Objek Penelitian	32
B. Tata Kelola Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes Di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kab Gowa.....	34
1. Transparansi (Transparency).....	35
2. Akuntabilitas (Accountability)	39
3. Partisipasi (Participation).....	43
4. Faktor Pendukung dan Penghambat	45
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	46
1. Transparansi (Transparency).....	46
2. Akuntabilitas (Accountability)	47
3. Partisipasi (Participation).....	48
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN	58

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 4. 1 Bagan Struktur Pemerintahan Desa Garing 34
- Gambar 4. 2 Perencanaan Pengelolaan Keuangan Dalam Aplikasi Siskeudes.... 38



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	7
Tabel 3.1 Data Informan Penelitian	27
Tabel 4.1 Daftar Nama-Nama Pejabat Administrasi Pemerintahan di Desa Garing.....	33
Tabel 4.2 Matriks Hasil Penelitian	50



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebutan desa berasal dari bahasa “deca’ atau "tanah air’, kelahiran. Dalam KBBI mendefinisikan "desa" sebagai suatu wilayah yang memiliki banyak keluarga dan memiliki sistem pemerintahan sendiri. Desa dibentuk berdasarkan inisiatif dari unsur kepala keluarga yang telah memiliki tempat tinggal yang tetap, mempertimbangkan asal muasal wilayah, bahasa, adat, ekonomi, dan sosial budaya penduduk local dan bergantung pada sumber daya alam untuk bertahan hidup. Desa berbeda dengan kelurahan yang berada di bawah pemerintahan di tingkat kecamatan. Desa merupakan suatu bentuk pemerintahan berada dibawah naungan kabupaten dan kota. Kelurahan hanya bertanggung jawab atas administrasi kecamatan yang tidak memiliki hak untuk memajemen atau mengawasi kepentingan masyarakat (Sugiman, 2018).

Didalam Undang-undng No. 23 Tahun 2014 tantang Pemerintahan Daerah merubah relasi Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Selama ini, Otda hanya dianggap sebagai pemindahan tanggungjawab oleh pemerintah pusat ke pemma demi kepentingan umum. Namun, otda adalah bagian penting dari pelimpahan kekuasaan politik serta ekonomi oleh pusat ke daerah agar pertumbuhan dan kemajuan ekonomi dapat berjalan secara merata. Didalam UU itu juga menegaskan konsep otonomi daerah dalam struktur NKRI. Urusan Wajib Daerah adalah perubahan penting lain tidak termasuk dalam UU No. 32 tahun 2004.

Relasi dari Pemerintah Pusat, ke Provinsi, Kabupaten/Kota yang secara langsung tercantum dalam aturan tersebut (Nur Wijayanti, 2017).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kristina Korniti Kila, 2014): Dalam hal keuangan dan anggaran, pengelolaan bisa memiliki definisi dalam arti 'proses, metode, perbuatan mengendalikan, memanejemen, penyelenggaraan, pengurusan. Menurut definisi ini, pengelolaan diartikan sebagai "mengontrol, mengatur, menyelenggarakan, pengurusan, dan menjalankan'.

Sesuai didalam Undang-Undang Desa disampaikan bahwa Keuangan Desa hak dan tanggung jawab dimiliki oleh Desa yang memiliki nilai moneter dan sesuatu yang memiliki nilai moneter atau dalam bentuk barang yang berkaitan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban Desa (Norliani et al., 2020). Prinsip-prinsip organisasi yang baik, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, tetap ada dalam tata kelola. Meskipun istilah good governance masih baru, banyak definisi telah dibuat untuk menjelaskannya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa tata pemerintahan yang baik dianggap penting untuk menjamin kemakmuran negara dengan meningkatkan reliabilitas, akuntabilitas, dan pengambilan kebijakan di pemerintahan, korporasi (swasta), dan bahkan organisasi masyarakat sipil. Menurut Badan Pembangunan Internasional Kanada, tata kelola yang baik adalah ketika otoritas organisasi atau pemerintah digunakan secara efektif, adil (merata), jujur, transparan, dan akuntabel (Zulkarnaen et al., 2021).

Secara umum, menurut Setia Mulyawan, manajemen keuangan mencakup kebijakan yang digunakan untuk mengawasi keuangan suatu badan hukum agar pengeluaran investasi dapat digunakan secara efisien. Secara hukum, Dalam pasal

1 (6) Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Desa disampaikan ‘Pengelolaan Keuangan Desa merupakan seluruh agenda yang berkaitan keuangan desa: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban” (Wijaya & Roni, 2019).”

Menurut Sutabri (Norliani et al., 2020), Aplikasi merupakan suatu metode yang di memiliki fungsi khusus serta terpadu sesuai kompetensi yang dimilikinya. Asropudin (Norliani et al., 2020), Aplikasi ialah suatu *software* yang didesain oleh perusahaan komputer dalam mengoperasikan proyek tertentu. Sementara dalam persiapan Undang-undang tentang Desa, pengembangan aplikasi Sistem Keuangan Desa telah dimulai sejak awal (Mooduto, 2020). Aplikasi Sistem Keuangan Desa ialah alat atau aplikasi yang di rancang BPKP agar dapat membantu pekerjaan pemerintah desa agar pelaporan keuangan desa dengan tujuan kemajuan. Peningkatan aplikasi Sistem Keuangan Desa sudah disiapkan dari awal untuk menerapkan Undang-undang tentang Desa.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISK EUDES) dirancang oleh BPKP dalam membantu pemerintah desa untuk melaporkan kondisi keuangannya. Aplikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa ketentuan dan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-undang Desa, terkhususnya yang berkaitan dengan keuangan serta pembangunan desa, dapat diterapkan dengan efektif di seluruh tingkatan pemerintah. Perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban merupakan proses pengelolaan keuangan yang dapat digunakan oleh pemerintah desa. Kesempatan besar diberikan kepada pemerintah desa untuk mengelola tata kelola pemerintahannya

sendiri, dalam mengelola keuangan mereka, dan melakukan pembangunan untuk peningkatan kesehatan dan kualitas kehidupan penduduknya (Mooduto, 2020).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa sangat berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sejak tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Gowa telah mensosialisasikan penggunaan Sistem Keuangan Dana Desa (Siskeudes). Bahkan di seluruh desanya, Gowa ialah satu-satunya kabupaten di Sulawesi Selatan yang menggunakan aplikasi ini. Kepala daerah dari Kawasan Timur Indonesia, yang mencakup 14 kabupaten di Indonesia, adalah bupati Gowa yang hadir di Istana Negara. H Muh Asrul, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Gowa. Dalam penjelasan mengenai Siskeudes. Aplikasi Siskeudes ini dimaksudkan untuk membuat aparat pemerintah desa lebih mudah menjalankan pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Asrul mengatakan bahwa mereka juga berharap dapat membuat pengelolaan keuangan desa menjadi jelas, jujur, dan terlibat. Proses perencanaan dan penganggaran termasuk dalam aplikasi ini sendiri (Dhyni, n.d. 2022).

Terbatasnya kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Desa untuk menjalankan aplikasi siskeudes ini membuat Laporan Pertanggung Jawaban desa kadang terhambat dan mengakibatkan keterlambatan pancairan anggaran desa sehingga menimbulkan keterlambatan pembangunan desa. Juga minimnya pemahaman pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan Keuangan di Desa bagi Aparatur dapat mengakibatkan pertanyaan menduga duga di kalangan masyarakat. Kendala yang paling fatal dalam pelaksanaan aplikasi SISKEUDES di Desa

Garing adalah jaringan yang kurang memadai sehingga ada keterlambatan pengimputan data langsung ke aplikasi SISKEUDES tersebut.

Berdasarkan Latar belakang diatas, saya mengambil fokus penelitian dengan judul **Tata Kelola Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes Di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kab Gowa.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tata Kelola Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes Di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kab Gowa?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat Tata Kelola Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes Di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kab Gowa.

C. Tujuan Penelitian

Dengan berdasar rumusan masalah, karena itu tujuan penelitian ini ialah:

1. Bagaimana pelaksanaan Tata Kelola Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes Di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kab Gowa serta,
2. Bagaimana faktor penghambat dan faktor pendukung dalam Tata Kelola Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes Di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kab Gowa.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat berkontribusi dan bermanfaat yakni:

1. Secara Teoritis

Penelitian yang akan dilakukan berupa kumpulan gagasan ilmiah tentang perkembangan ilmu pemerintahan, terutama tentang Tata Kelola Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes Di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kab Gowa.

2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan sumber daya untuk pelaksanaan Tata Kelola Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes Di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kab Gowa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan penulis tentang Tata Kelola Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes Di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kab Gowa. merujuk kepada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk menghindari kesamaan penelitian maka adapun rujukan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

NO	JUDUL	PENULIS	HASIL
1	Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Kertak Empat Kecamatan Pengaron	Indrianti, R., Herman, M., Fibrianita	keuangan desa sudah dimanfaatkan di desa Kerak Empat Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar mulai tahun 2017. Namun, aplikasi ini belum maksimal karena kurangnya sumber daya atau kemampuan teknis dan kurangnya komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten.
2	Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Siskeudes Di Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa	Astuti, A, B., Anggraini, O., Kusumawirant, R.	Aplikasi Siskeudes dapat digunakan untuk mengelola keuangan desa agar tertib, efisien, dan efektif. Akan tetapi ada beberapa kendala yang terkait dengan aplikasi Siskeudes. Pertama, aplikasi cuma dapat dijangkau di sekitar kantor desa. Selanjutnya, ketika aplikasi diakses secara offline dan kemudian diakses secara online,.

NO	JUDUL	PENULIS	HASIL
	Berbasis Siskeudes Di Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul		kadang-kadang data hilang. Pemerintah kabupaten hanya bisa secara manual. Hal itu disebabkan karena format laporan konsolidasi di Siskeudes belum bisa dioperasikan. Untuk meningkatkan pengelolaan keuangan desa, pemerintah kabupaten harus meningkatkan pendampingan, fasilitasi, dan pelatihan. Aplikasi Siskeudes untuk mencapai lebih banyak.
3	Efektivitas Penerapan Praktek Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Solan Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong	Hasanah, S, W., Setiawati, B.	Hasil riset menunjukkan bahwa aplikasi SisKeuDes dianggap efektif untuk mengelola keuangan desa Solan.
4	Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)	Jehan, M., Malahika, H., Karamoy, R, J, P.	Dari hasil riset tersebut : (1) Sistem Keuangan Desa telah dilaksanakan di Desa Suwaan; (2) Pemanfaatan Sistem Keuangan Desa dijalankan dengan 4 tahap: Perencanaan, Penyelenggaraan, Penatausahaan, dan Pelaporan; dan (3) Kinerja setiap karyawan telah ditingkatkan oleh Sistem Keuangan Desa. Akibatnya, Desa Sistem Keuangan mempunyai strategis dalam pemerintahan desa yang berdampak langsung pada

NO	JUDUL	PENULIS	HASIL
			<p>pegawai desa. Hal ini relate dengan tujuan penyelenggaraannya, yakni efisiensi pekerjaan pegawai desa. Pemerintah Desa dan Sistem Keuangan Desa adalah Kata Kunci.</p>
5	<p>Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Desa Banyuanyar</p>	<p>Atintyasputri, A, Y, W.</p>	<p>Hasil riset ini menemukan bahwa tahap pengelolaan keuangan desa Permendagri 113 Tahun 2014, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban melalui aplikasi Siskeude, telah diterapkan dengan baik di Desa Banyuanyar Boyolali. Namun, penerapan tahapan pertanggungjawaban memiliki beberapa perbedaan; aplikasi Siskeudes hanya berfungsi untuk lampiran lengkap yang diperlukan bukti LPJ. Namun tidak berpengaruh ke cara pengelolaan dana desa Banyuanyar. Aplikasi tersebut dapat digunakan untuk mengawasi pengelolaan keuangan desa dan melakukan apa yang dibutuhkan.</p>

1. Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Kertak Empat Kecamatan Pengaron, Indrianti, R., Herman, M., Fibriyanita, F, Memiliki kesamaan dalam penelitian aplikasi sistem siskeudes, Letak perbedaan terletak pada fokus

penelitian penelitian terdahulu adalah efektivitas sedangkan peneliti fokus penelitiannya pada tata kelola.

2. Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Siskeudes Di Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Siskeudes Di Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul, Oleh Astuti, A, B., Anggraini, O., Kusumawirant, R., Memiliki kesamaan pada pengelolaan keuangan desa berbasis siskeudes, Letak perbedaan terletak pada fokus penelitian, fokus penelitian terdahulu berfokus pada implementasi sedangkan peneliti berfokus pada tata kelola.
3. Efektivitas Penerapan Praktek Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Solan Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, Hasanah, S, W., Setiawati, B, Memiliki kesamaan pada penelitian siskeudes, Letak perbedaannya berada difokus penelitian. Penelitian terdahulunya hanya fokus terhadap efektifitas penerapan dan praktek spengelolaan keuangan desa berbasis siskeudes sedangkan peneliti berfokus pada tata kelola keuangan desa berbasi aplikasi siskeudes.
4. Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara), Oleh Jehan, M., Malahika, H., Karamoy, R, J, P, Memiliki kesamaan, saling meneliti persoalan siskeudes, Letak perbedaan terletak pada fokus penelitian terdahulu fokus pada penerapan sistem

keuangan desa sedangkan peneliti lebih fokus kepada penerapan sistem siskeudes.

5. Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Desa Banyuwangi, oleh Atintyasputri, A, A, W, Memiliki kesamaan dalam meneliti pengelolaan dana desa melalui aplikasi siskeudes, Letak perbedaan terletak pada fokus penelitian terdahulu berfokus kepada analisis implementasi sedangkan peneliti berfokus pada tata kelola keuangan.

B. Teori Dan Konsep

1. Teori Tata Kelola Keuangan Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kristina Korniti Kila, 2014): Dalam hal keuangan dan anggaran, pengelolaan dapat disamakan sebagai "langkah proses, metode, perbuatan pengendalian, pengaturan, penyelenggaraan, mengurus, serta menjalankan". Menurut definisi ini, pengelolaan dapat didefinisikan sebagai "mengendalikan, mengatur, menyelenggarakan, mengurus, dan menjalankan".

Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa merupakan hubungan dari manajemen keuangan desa. Ada batasan waktu dan aturan yang harus diikuti dalam prosedur tersebut. Pada fase perencanaan program desa, adalah mungkin untuk mendorong partisipasi masyarakat dengan memaksimalkan musyawarah desa. Pemanfaatan sumber daya manusia, dan dana agar bisa menjalankan program desa adalah tahapan pelaksanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan program. Kemudian, bedahara desa melakukan pencatatan

melalui penatausahaan. Laporan dan pertanggungjawaban diberikan setiap semester dan setiap tahun. Selanjutnya, tujuan pengawasan dan evaluation adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan sudah selaras dengan rencana, mencapai hasil, dan membuat perbaikan untuk dilakukan pada tahun berikutnya (Rivan, Arif & Maksum, 2019).

Menurut Munti & Fahlevi (Finambelo, 2020), Menurut studinya, terdapat faktor yang bisa berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Pertama, kemampuan, pengetahuan, pengalaman, dan dorongan lingkungan kerja aparatur desa memengaruhi aktivitas kerja. Kedua efek ketaatan pelaporan keuangan terhadap kegiatan pengelolaan keuangan desa terkait dengan pemberian kewenangan: pemerintah desa diwajibkan untuk melakukan pertanggungjawaban dan melaporkan langsung kepada pemerintah kabupaten. Tingkat pengawasan tiga tingkat Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan keuangan desa menentukan kualitasnya.

Setidaknya ada 3 prinsip yang menjadi landasan dalam pengelolaan keuangan daerah (Ngakil & Kaukab, 2020). Pertama, prinsip keterbukaan/transparansi. Transparansi berarti semua orang dalam masyarakat memiliki kesamaan hak untuk bisa mendapatkan informasi terkait proses anggaran. Karena berkaitan dengan kepentingan publik, dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan publik. Kedua, prinsip akuntabilitas, Prinsip ini mengacu pada unsur pertanggungjawaban. Bahwa semua proses penganggaran, dimulai dari perencanaan, penyusunan, dan implementasinya, dipertanggungjawabkan dan wajib dilaporkan kepada masyarakat dan Dewan Perwakilan. Anggaran tersebut

tidak hanya harus diketahui oleh masyarakat, tetapi juga memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban dalam rencana dan pelaksanaan anggaran. Ketiga, prinsip value for money yang mengacu pada penerapan tiga prinsip utama dalam penganggaran yang ekonomis, efisiensi, serta efektif. Pemilihan dan pemanfaatan sumber daya secara kuantitas dan kualitas tertentu dengan estimasi biaya yang murah adalah aspek ekonomis (Ngakil & Kaukab, 2020).

Indikator Good Government Governance Mahsun (Marliana, 2019) yaitu :

- 1) *Transparansi (Transparency)*, Untuk memastikan bahwa suatu pemerintahan tetap objektif, persamaan perlu tersedianya informasi yang sesuai dengan metode yang mudah didapat dan mudah dimengerti. Konsep transparansi atau transparansi dikenal sebagai prinsip transparansi.
- 2) *Akuntabilitas (Accountability)* Prinsip akuntabilitas mengatakan bahwa perusahaan atau pemerintah harus dapat menunjukkan hasilnya secara jelas. Makanya pemerintah harus dikelola dengan baik dan sesuai dengan undang-undang.
- 3) *Partisipasi (Participation)* merupakan terlibat atau dilibatkannya individu dalam upaya pengambilan keputusan.

Terjemahan dari kata "management" dari bahasa Inggris menjadi "manajemen" disebabkan oleh banyaknya kata pungut yang dimasukkan didalam bahasa Indonesia. "Manajemen" atau "to manage", berarti "mengatur." Pengeturan ini dijalankan dengan mekanisme dan diatur sesuai fungsi manajemen. Oleh karena itu, manajemen adalah suatu cara dalam mencapai tujuan melalui berbagai komponennya, seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerak, dan

pengendalian (Risnawati, 2017). Terry (Risnawati, 2017) mengatakan manajemen merupakan langkah yang unik yaitu action, dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian, yang diterapkan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada dalam menggapai tujuan (Risnawati, 2017) pengelolaan merupakan pengadministrasian pengaturan dan penataan suatu kegiatan. Menurut Terry (Aprillia, 2021) menjelaskan bahwa pengelolaan yaitu:

- a. Perencanaan (*Planning*) adalah fungsi dari manajemen yang esensial dalam upaya menggapai goals dari organisasi. Menurut Terry, perencanaan adalah proses intelektual yang sistematis dan terorganisir yang mengarahkan pemikiran pada tujuan-tujuan tertentu serta aksi yang mendukung pencapaian tujuan tersebut.
- b. Pengorganisasian (*Organizing*) adalah proses pembentukan struktur, sistem, dan pengaturan sumber daya dalam organisasi agar bisa menggapai tujuan-tujuan yang telah dipatenkan. Ini mencakup penentuan tugas-tugas yang harus dilakukan, pengelompokkan tugas-tugas tersebut menjadi unit-unit kerja yang koheren, dan pengaturan wewenang serta tanggung jawab di antara anggota organisasi.
- c. Penggerakan (*Actuating*) adalah berbagai kegiatan yang ditujukan untuk menggerakkan personal dan kelompok dalam organisasi untuk menggapai tujuan yang sudah disepakati.
- d. Pengawasan (*Controlling*) merupakan fungsi manajemen berkaitan dengan memantau, mengevaluasi, dan mengatur kinerja organisasi serta mengambil tindakan objektif jika dibutuhkan untuk menjamin ketercapaian tujuan.

2. Teori UU Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah peraturan penting dalam konteks pemerintahan desa di Indonesia. Regulasi ini menjadi dasar hukum bagi pembentukan, pengaturan, dan pengelolaan desa di Indonesia. Namun, pengelolaan keuangan desa mencakup semua aktivitas yang memiliki relasi dengan pengelolaan keuangan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan (Fahrizal, 2018).

Atmaja (Mamuaya et al., 2017), menyampaikan bahwa keuangan desa merujuk pada pengelolaan keuangan di tingkat pemerintahan desa. Ini mencakup pengelolaan pendapatan, pengeluaran, serta penyusunan dan pelaksanaan anggaran di tingkat desa. Berikut adalah beberapa aspek yang terkait dengan keuangan desa yakni Pendapatan Desa, Pengeluaran Desa, Anggaran Desa, Pelaporan Keuangan, Pengawasan, Pertanggungjawaban, dan Pengelolaan Risiko. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 mengatur tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan ini berorientasi memberikan landasan nyata bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangan desanya agar efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Tujuan dana desa adalah untuk mensupport pembangunan, pelayanan, dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Dana desa bertujuan untuk, Mendorong pembangunan infrastruktur dan sarana publik di desa, Mendukung pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan sanitasi, Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui berbagai program pengembangan ekonomi local, Memperkuat kualitas pemerintah desa dalam mengelola sumber daya dan

pembangunan desa dan Meningkatkan keterlibatan publik dalam pembangunan pedesaan dan adanya transparansi, akuntabilitas pemanfaatandana desa (I Nyoman Sutapa, 2018).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Pasal 2 Ayat (1), "Keuangan desa didasarkan pengelolaannya dalam asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib (Wijaya & Roni, 2019).”Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah (Wijaya & Roni, 2019) menyampaikan terdapat asas yang perlu menjadi rujukan di dalam memanage keuangan desa seperti:

- a) Asas kesatuan adalah prinsip dasar dalam sistem pemerintahan yang menegaskan bahwa wilayah suatu negara harus diatur secara terpadu dan bersatu. Asas ini menekankan bahwa otoritas pemerintah yang diberikan oleh konstitusi atau hukum berlaku di seluruh wilayah negara tanpa terkecuali.
- b) Asas universalitas adalah prinsip yang menekankan bahwa semua masyarakat berhak dan berlaku untuk semua individu. Tanpa pandang bulu atau diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, atau dasar sosial lainnya. Prinsip ini menyatakan bahwa tiap orang kesetaraan dan berhak untuk hidup, kebebasan, dan keadilan, serta hak untuk diakui sebagai individu yang berharga di masyarakat. Asas universalitas juga menegaskan bahwa hak manusia ialah prinsip yang berlaku di seluruh dunia, independen dari sistem politik, budaya, atau agama negara tertentu.

- c) Asas tahunan, tidak umumnya dikenal dalam konteks pemerintahan atau hukum. Namun, jika Anda merujuk kepada "anggaran tahunan", ini adalah prinsip di mana pemerintah menyusun rencana keuangan dan alokasi anggaran untuk satu tahun fiskal atau satu periode tahunan tertentu. Rencana anggaran tahunan mencakup pendapatan yang diharapkan, alokasi dana untuk berbagai program dan kegiatan, serta proyeksi pengeluaran selama satu tahun ke depan. Prinsip ini penting dalam mengatur keuangan pemerintah dan menetapkan prioritas pengeluaran berdasarkan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia pada setiap tahun fiskal.
- d) Asas spesialisasi adalah prinsip dalam hukum yang menetapkan bahwa sebuah lembaga atau otoritas hanya memiliki kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan tindakan atau mengambil keputusan dalam lingkup atau wilayah tertentu yang telah diputuskan dengan spesifik.
- e) Asas akuntabilitas merupakan prinsip dalam pemerintahan yang menuntut para aparatur pemerintah serta lembaga publik memiliki tanggungjawab terhadap apa yang mereka lakukan kepada pihak-pihak yang mereka layani atau kepada masyarakat secara umum.
- f) Asas proporsionalitas, adalah prinsip hukum yang menuntut bahwa tindakan atau putusan yang dipilih oleh pemerintah dan lembaga publik harus setingkat dengan tujuan yang ingin diraih dan tidak lebih dari apa yang dibutuhkan dalam menggapai tujuan.

- g) Asas profesionalitas dalam pengelolaan dana desa mengacu pada prinsip bahwa proses mengelola keuangan desa perlu adanya standar profesional yang berkualitas. Ini melibatkan penerapan praktik terbaik dalam perencanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pengawasan keuangan desa.
- h) Asas keterbukaan dalam pengelolaan dana desa mengacu pada prinsip bahwa proses pengelolaan keuangan desa perlu adanya transparansi dan terbuka untuk umum.
- i) Asas pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pemanfaatan dana desa mengacu dalam prinsip bahwa pemanfaatan dana desa harus diselenggarakan secara transparan dan akuntabel, serta tunduk pada pemeriksaan yang ketat oleh lembaga pemeriksa keuangan negara.
- j) Asas "value for money" dalam pengelolaan dana desa mengacu pada prinsip bahwa penggunaan dana desa harus menghasilkan nilai atau manfaat yang sebesar-besarnya sebanding dengan jumlah uang yang diinvestasikan.
- k) Asas kejujuran dalam pengelolaan dana desa mengacu pada prinsip bahwa para pengelola dan pejabat desa harus bertindak dengan jujur dan adil dalam mengelola serta menggunakan dana desa.
- l) Asas pengendalian dalam pengelolaan dana desa mengacu pada prinsip bahwa proses pengelolaan keuangan desa harus diatur dan dikontrol dengan cermat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan, penyelewengan, atau kesalahan dalam penggunaan dana tersebut.

- m) Asas ketertiban dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan dana desa mengacu pada prinsip bahwa seluruh kegiatan terkait dengan pemanfaatan dana desa wajib dilakukan dan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
- n) Asas bertanggung jawab dalam pengelolaan dana desa mengacu pada prinsip bahwa para pengelola dan pejabat desa bertanggungjawab dalam menjalankan amanah mereka dengan serius.
- o) Asas keadilan dalam mengelola dana desa mengacu dalam prinsip bahwa pemanfaatan dana desa harus dilakukan dengan adil dan merata, tanpa diskriminasi atau kepentingan pribadi yang tidak adil.
- p) Asas kepatutan dalam mengelola dana desa mengacu prinsip bahwa pemanfaatan dana desa harus dilakukan secara wajar, sesuai dengan tujuan dan kepentingan masyarakat desa secara umum.
- q) Asas manfaat untuk masyarakat dalam pengelolaan dana desa berlandaskan prinsip bahwa pemanfaatan dana desa harus menghasilkan dampak yang positif dan bermanfaat bagi kesejahteraan dan kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan.

Kata "desa" datang dari dari bahasa Sanskerta "désa" yang bermakna "tanah" atau "tempat tinggal". Secara etimologis, kata "desa" merujuk pada sebuah pemukiman atau komunitas kecil yang terletak di pedesaan atau di luar kota besar. Istilah ini sering digunakan untuk menyebut wilayah yang lebih kecil daripada kota dan cenderung memiliki populasi yang lebih sedikit. Desa juga seringkali terkait dengan kehidupan agraris, pertanian, dan tradisi komunal.

Umumnya, dalam buku tentang otonomi desa, definisi desa akan mencakup konsep tentang unit administratif di tingkat lokal yang memiliki kemandirian dalam mengelola urusan-urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat lokal. Definisi ini juga mungkin menggambarkan hubungan antara desa dengan pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah pusat dalam konteks sistem pemerintahan yang terdesentralisasi atau otonomi daerah yang lebih luas (Barniat, 2019).

Menurut buku "Otonomi Desa", sebuah desa adalah kumpulan masyarakat yang diatur dalam hukum serta memiliki struktural yang didasarkan pada hak asal muasal unik. Pemerintahan desa berdasar pada keanekaragaman, keikutsertaan, otonomi, demokratis, dan pemberdayaan. Desa dan desa adat, atau "desa", adalah kesatuan masyarakat secara hukum dengan memiliki batas wilayah yang memiliki otoritas untuk mengatur dan mengurus urusan dalam pemerintahan, hak muasal, dan hak klasik yang dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia (Sugiman, 2018).

Menurut Kartohadikusumo, (Wonok, 2020) desa adalah sebuah pemukiman atau komunitas kecil yang terletak di pedesaan atau di luar kota besar. Biasanya, desa memiliki populasi yang lebih kecil daripada kota dan seringkali memiliki struktur sosial dan budaya yang lebih tradisional. Kehidupan di desa sering terkait erat dengan pertanian, peternakan, atau kegiatan ekonomi lain yang berhubungan dengan sumber daya alam. Desa juga sering menjadi tempat di mana nilai-nilai kebersamaan dan tradisi lokal dijaga dan dilestarikan. Definisi ini bisa bervariasi sesuai dengan konteks geografis, sosial, dan budaya yang berbeda-beda.

3. Teori Aplikasi Siskeudes

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Aplikasi keuangan desa ini menggunakan database Microsoft Access sehingga lebih portable dan mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi yang awam sekalipun. Secara teknis transaksi keuangan desa termasuk dalam kelompok skala kecil, sehingga lebih tepat ditangani secara mudah dengan database access ini. Penggunaan aplikasi dengan menggunakan database SQL Server hanya dikhususkan untuk tujuan tertentu atau volume transaksi sudah masuk dalam kategori skala menengah. Fitur-fitur yang ada dalam Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dibuat sederhana dan user friendly sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi SISKEUDES di kemukakan oleh Admaja (Kereh et al., 2022).

Aplikasi sistem keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan suatu aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan pemerintah desa (BPKP, 2016). Fitur-fitur yang disajikan dalam aplikasi pengelolaan keuangan desa dibuat sederhana dan user friendly sehingga memberikan kemudahan kepada pengguna dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes. Sistem Aplikasi Siskeudes mempunyai kelebihan sebagai berikut: sesuai peraturan, memudahkan tata kelola keuangan desa, kemudahan penggunaan aplikasi, dilengkapi dengan sistem pengendalian intern (built-in internal control), serta dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi (Hayati, 2021).

Fitur Aplikasi Sistem Keuangan Desa Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Fitur-fitur yang terdapat dalam Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dibuat sederhana dan user friendly sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi sistem keuangan desa. Proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, antara lain (Hayati, 2021):

- a. Dokumen Penatausahaan
- b. Bukti Penerimaan
- c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- d. Surat Setor Pajak (SSP)
- e. Dan dokumen-dokumen lainnya
- f. Laporan Penganggaran (Perdes APB Desa, RAB, APB Desa persumber danag.
- g. Laporan Penatausahaan Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pembantu dan Register.

Sesuai Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, bekerja sama Kementrian Dalam Negeri dan Kemedesa PDTT, mengembangkan Siskeudes, sebuah aplikasi sistem keuangan desa. Desa mengelola uang yang diperoleh dari Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer, serta Alokasi Dana Desa, Bagi hasil perolehan Pajak dan

Retribusi Daerah, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Fitur—Aplikasi sistem keuangan desa memiliki fitur yang membuatnya mudah digunakan dan mudah digunakan (BPKP, 2015) (Indrianti et al., 2020).

C. Kerangka Pikir

Untuk dapat mengukur penelitian di atas saya sebagai peneliti mengambil konsep Good Government Governance Mahsun dkk (Marliana, 2019) yaitu :

1. Transparansi (*Transparency*)
2. Akuntabilitas (*Accountability*)
3. Partisipasi (*Participation*)



Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Pikir Penelitian

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian saya adalah tentang bagaimana Tata Kelola Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes Di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Penetapan fokus penelitian ini urgent dan memiliki hubungan dengan masalah dan data yang diperoleh, sehingga peneliti dapat dengan mudah menemukan data. Serta bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat Tata Kelola Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes Di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kab Gowa.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Good Government Governance dalam Mahsun dkk (Marliana, 2019) yaitu:

1. **Transparansi (Transparency)** Untuk memastikan bahwa suatu pemerintahan tetap objektif, persamaan harus tersedia akses informasi yang sesuai dengan cara yang mudah dan dimengerti oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Konsep keterbukaan merupakan prinsip dasar dari prinsip ini.

Sesuai dengan pengertian diatas dalam pengelolaan keuangan berbasis SISKEUDES harus memiliki informasi dalam bentuk fisik yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, dengan mengedepankan transparansi ke masyarakat dan mudah di pahami oleh masyarakat.

2. **Akuntabilitas (Accountability)** merupakan prinsip dalam suatu perusahaan atau pemerintahan wajib bertanggungjawab akan kinerjanya secara transparansi. Sehingga pemerintahan perlu diatur secara nyata dan sesuai dengan peraturan yang ada.

Sesuai dengan penjelasan diatas dalam pengelolaan keuangan berbasis SISKEUDES harus transparan kepada seluruh masyarakat Desa dengan pengelolaan yang baik dan benar sesuai dengan aturan tentang pengelolaan SISKEUDES.

3. Partisipasi (Participation) adalah dilibatkannya individu dalam membuat keputusan. Partisipasi tersebut diproyeksikan dengan dasar kebebasan berasosiasi dan berpendapat serta terlibat secara konstruktif.

Sesuai dengan apa yang di jelaskan diatas dalam penyusunan pengelolaan keuangan desa berbasis SISKEUDES diharuskan terbuka untuk seluruh masyarakat, dengan dibangun atas dasar kebebasan berpendapat sesuai denga pembahasan secara tupoksi.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Durasi waktu penelitian ini dilakukan 2 bulan. Titik lokasi penelitian berada pada Desa Garing, Kantor Desa Garing.

B. Waktu Dan Jenis Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis metode penelitian kualitatif dimanfaatkan dalam penelitian kali ini, yakni dapat memberikan gambaran tentang Tata Kelola Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes Di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kab Gowa.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini deskriptif dengan didukung data kualitatif dimana penelitian memiliki tujuan untuk mengungkap fakta dalam Tata Kelola Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes Di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kab Gowa.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Dalam penelitian ini datanya diperoleh dan dikumpulkan dari observasi, dokumentasi dan interview yang didapatkan langsung informan penelitian. Data tersebut didapatkan secara langsung dengan cara tatap muka dan transparan.

2. Data Sekunder

Kemudian data sekunder didapatkan dari proses pencarian studi kepustakaan, referensi jurnal, perundang-undangan, dokumen, observasi dilokasi penelitian.

D. Informan Penelitian

Teknik purposive sampling digunakan dalam menentukan informan yang dengan sengaja dipih dengan mempertimbangkan kreteria dan spesifikasi yang dibutuhkan dalam penelitian tentang Tata Kelola Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes Di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kab Gowa. Penentuan informan ini telah ditentukan oleh peneliti dengan pemahaman yang dapat memberikan informasi dan data terhadap kebutuhan penelitian. Berikut dapat dilihat informan penelitian di di tabel 3.1

Tabel 3. 1 Data Informan

NO.	NAMA	INISIAL	JABATAN
1	Muhammad Sidiq	MHS	Kepala Desa
2	Tasmin	TSM	Sekretaris Desa
3	Muh. Rizal Rasyid	MRR	Kaur Pemerintahan
4	Resky Nur Amaliah	RNA	Kaur Keuangan
5	Drs. Sabang Nai	SBN	Kepala BPD
6	Muhammad Sidiq	MSD	Kadus. Bontobiraeng
7	Arif Budiman	ARB	Kadus. Bulueng
8	H Makmur	MKM	Tokoh Masyarakat
9	Sumarni	SMN	Masyarakat

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu teknik yang dipergunakan untuk mendapat informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Berikut cara yang diterapkan dalam memperoleh data ialah:

1. Observasi yaitu untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang perilaku manusia, lingkungan, atau fenomena tertentu, kita perlu melakukan pengamatan langsung. Ini disebut sebagai teknik pengumpulan data observasi. Teknik ini melibatkan penelitian yang berfokus pada mengamati langsung subjek atau kejadian yang diamati.
2. Wawancara, teknik pengumpulan data melalui wawancara merupakan salah satu metode yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman, pandangan, atau persepsi individu terkait dengan subjek penelitian.
3. Dokumentasi yaitu Teknik pengumpulan data dokumen adalah metode yang melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai dokumen yang relevan dengan subjek penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa tulisan, laporan, catatan, arsip, atau materi tertulis lainnya yang dapat memberikan wawasan atau informasi yang dibutuhkan untuk penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Sugiyono (Pernaando et al., 2021) menyatakan analisis data merupakan langkah menggali informasi menyusun secara terstruktur dari data yang didapatkan dari lapangan, dan wawancara. Langkah ini meliputi mengatur data ke dalam kategorisasi, dimasukkan dan dijabarkan, upaya sintesa, membuat pola.

Kemudian memilah yang urgent dan yang harus diamati, dan dapat menarik kesimpulan agar dapat dicermati. Analisis data dalam penelitian ini memanfaatkan konsep dari Miles dan Huberman. Ini juga dikenal sebagai teknik analisis data interaksional, yang berarti analisis data dilakukan secara interaksional dan secara konsisten hingga data menjadi jenuh. Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data digunakan dari awal kegiatan pra lapangan hingga selesainya penelitian. Menurut model Miles dan Huberman (Rijali, 2019), proses analisis data mencakup proses pengumpulan data, pengurangan (reduksi data), penampilan (penyajian data), dan kesimpulan atau verifikasi (Rijali, 2019)

1. Reduksi data adalah proses dalam analisis kualitatif di mana peneliti menyederhanakan dan mengorganisir data yang telah dikumpulkan agar lebih mudah dipahami, diinterpretasikan, dan dianalisis. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pola, tema, atau makna yang muncul dari data yang kompleks dan kemudian menggunakan informasi ini untuk mendukung kesimpulan atau temuan penelitian
2. Sajian data adalah cara untuk menampilkan informasi atau hasil analisis data secara visual atau deskriptif agar lebih mudah dipahami oleh pembaca atau audiens. Sajian data dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk tabel, grafik, diagram, narasi deskriptif, atau presentasi multimedia. Tujuan dari sajian data adalah untuk mengkomunikasikan temuan atau informasi yang ditemukan dari analisis data secara efektif dan persuasif.

3. Untuk dapat menarik kesimpulan saat mengumpulkan data, peneliti harus mencatat peraturan sebab akibat dan proporsi untuk memahami apa yang terjadi.

G. Pengabsahan Data

Keabsahan data penelitian merujuk pada seberapa dapat dipercaya dan akurat data yang dikumpulkan dalam sebuah studi. Ini adalah faktor kritis dalam menilai kualitas penelitian karena penarikan kesimpulan dan generalisasi yang tepat bergantung pada keabsahan data. Sugiyono (Pernando et al., 2021) Triangulasi adalah pendekatan metodologis dalam penelitian yang melibatkan penggunaan beberapa metode, sumber data, teori, atau peneliti untuk memvalidasi atau memperkuat temuan penelitian. Konsep ini berasal dari ilmu navigasi, di mana tiga titik referensi digunakan untuk menentukan posisi yang akurat, dan kemudian diterapkan dalam konteks penelitian untuk memastikan keabsahan dan keandalan temuan.

Validasi data sangat penting dalam penelitian karena menjamin keandalan dan keabsahan hasil yang diperoleh dari analisis data, peneliti dapat meningkatkan keandalan dan kepercayaan dalam penelitian mereka serta memastikan bahwa hasilnya memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman tentang subjek yang diteliti. Triangulasi dalam konteks teknik pengumpulan data adalah pendekatan yang melibatkan penggunaan beberapa metode atau sumber untuk mengumpulkan data sebagai cara untuk memvalidasi atau menguatkan temuan penelitian. Tujuannya adalah untuk meminimalkan bias, meningkatkan keandalan, dan mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang subjek penelitian.

1. Triangulasi sumber merupakan cara atau metode dalam riset yang dalam penerapannya melibatkan berbagai sumber data yang tidak sama untuk mendapatkan informasi tentang subjek penelitian yang sama. Pendekatan ini bertujuan untuk memvalidasi temuan dan mengurangi bias yang mungkin muncul dari menggunakan hanya satu sumber data.
2. Triangulasi metode adalah pendekatan dalam penelitian yang melibatkan penggunaan beberapa metode atau pendekatan yang berbeda dalam pengumpulan atau analisis data untuk memvalidasi temuan penelitian. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keandalan, keabsahan, dan kedalaman pemahaman tentang subjek penelitian.
3. Triangulasi waktu merupakan pendekatan dalam penelitian yang penerapannya melakukan pengumpulan data pada titik waktu yang tidak sama atau periode waktu yang berbeda. Tujuannya adalah agar memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait fenomena yang diteliti dengan memperhatikan perubahan atau variasi yang terjadi seiring waktu.
4. Member check adalah sebuah teknik dalam penelitian kualitatif di mana peneliti mengembalikan hasil penelitian kepada peserta atau subjek penelitian untuk memverifikasi atau memvalidasi temuan yang telah ditemukan. Tujuan dari member check adalah untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti tentang data sesuai dengan pengalaman atau pandangan subjek penelitian, serta untuk meningkatkan keandalan dan keabsahan hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Letak Geografis

Kecamatan Tompo Bulu terletak di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten Gowa sendiri terletak di bagian selatan Pulau Sulawesi. Secara geografis, Kecamatan Tompo Bulu terletak di sebelah utara Kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Demografi/Batas Desa

a. Batas wilayah

1. Disebelah utara Berdekatan dengan Kelurahan Malakaji
2. Disebelah Selatan Berdekatan dengan Kab. Jeneponto, Kec. Biringbulu
3. Disebelah barat Berdekatan dengan Kecamatan Biringbulu, Desa Datara
4. Disebelah Timur Berdekatan dengan Desa Bontobuddung dan Desa Tanete .

b. Luas Wilayah Desa Dalam Tata Guna Lahan

Luas Wilayah Desa Garing 13,88 km².

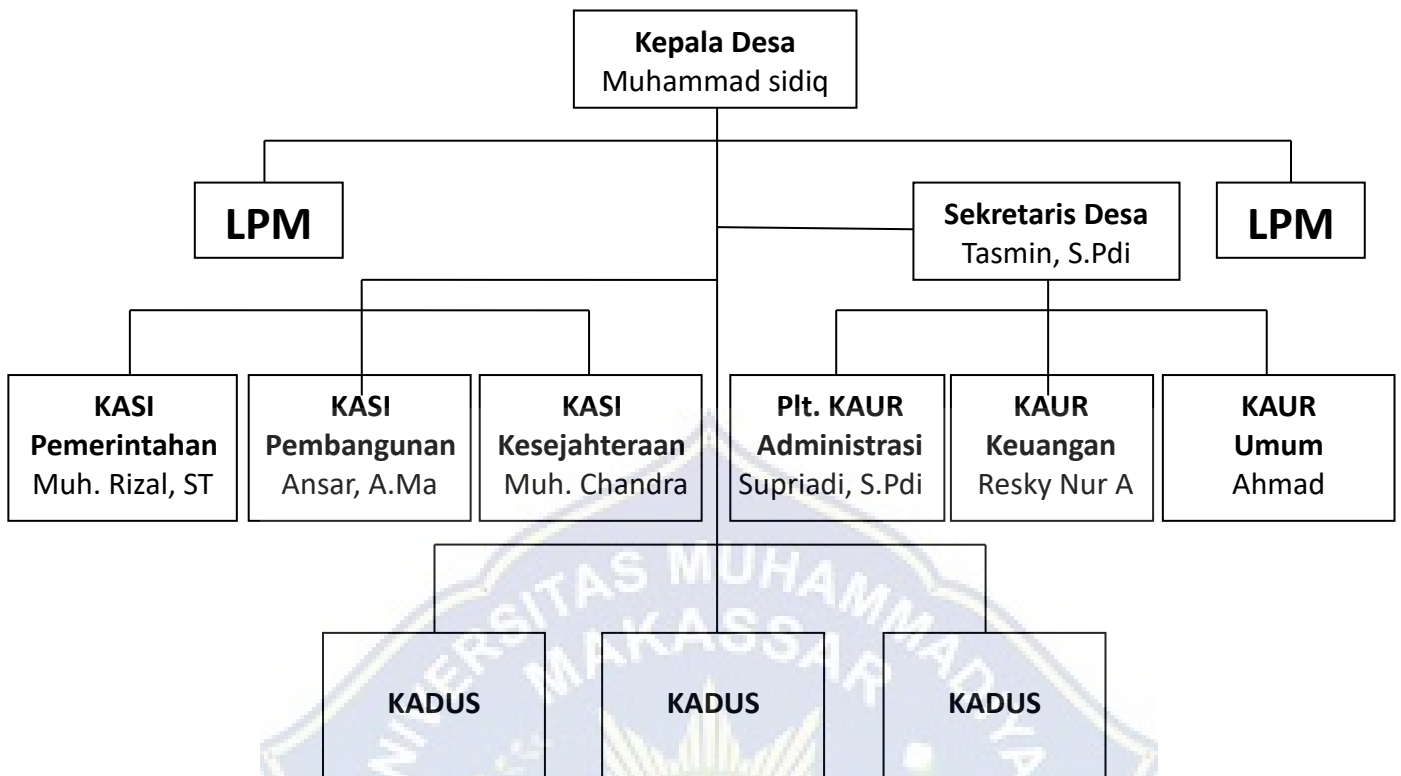
1. Hutan Desa atau Hutan Adat : 39 ha
2. Hutan dari Masyarakat :
3. Sektor Pertanian : 226 ha
4. Padang Penggembalaan Ternak :
5. Lahan : 22 ha
6. Tambang Golongan C : 1 ha
7. Pemukiman : 130 ha

1) Wilayah Dusun di Desa Garing :

- a. Dusun Bontobiraeng
- b. Dusun Bulueng
- c. Dusun Garing
- d. Dusun Cengkong
- e. Dusun Tamalabba
- f. Dusun Ta'lembo
- g. Dusun Bangkengtabbing

Tabel 4. 1 Pejabat Pemerintahan di Desa Garing

No	Nama	Jabatan
1	Muhammad Sidiq, SE	KEPALA DESA
2	Tasmin, S.Pdi	SEKRETARIS DESA
3	Supriadi, S.Pdi	KAUR Adminisrtasi
4	Resky Nur Amaliah MS.	KAUR Keuangan
5	Ahmad Dahlan, A.Ma	KAUR Umum
6	Muh. Rizal Rasyid, ST	Kasi Pemerintahan
7	Ansar, A.Ma	Kasi Pembangunan
8	Muh. Chandra Pratama RF.	Kasi Kesra



Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan Desa Garing

B. Tata Kelola Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes Di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kab Gowa

Perencanaan, pelaksanaan, laporan, dan pertanggungjawaban keuangan didesa adalah semua bagian dari manajemen keuangan desa. Setidaknya batasan dari segi durasi waktu dan aturan perlu dipahami dalam proses tersebut. Fase perencanaan program desa, adalah mungkin untuk mendorong keterlibatan masyarakat dengan memaksimalkan musyawarah desa. Pengelolaan dan menggerakkan SDM dan dana menjalankan program didesa merupakan tahap pelaksanaan yang berkaitan dalam pelaksanaan program. Kemudian, beahara desa mencatat melalui penatausahaan. Laporan dan pertanggungjawaban diberikan setiap semester dan setiap tahun. Selanjutnya, tujuan pengawasan serta evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan sesuai dengan

rencana, mencapai hasil, dan membuat perbaikan untuk dilakukan pada tahun berikutnya (Rivan, Arif & Maksum, 2019).

Indikator *Good Government Governance* dalam Mahsun (Marliana, 2019) yakni

1. Transparansi
2. Akuntabilitas
3. Partisipasi

1. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga objektivitas pemerintahan, transparansi dan keterbukaan mengatakan bahwa persamaan perlu tersedianya informasi yang sesuai dengan cara yang mudah didapatkan dan dipahami. Transparansi, menurut Mahmudi (2016:17), mengacu pada keadaan di mana suatu organisasi menjadi transparan dalam hal memberikan informasi kepada pemangku kepentingan terkait operasi pemanfaatan sumber daya. Transparansi di sektor publik adalah prinsip yang menekankan keterbukaan, akuntabilitas, dan aksesibilitas informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik. Hal ini mencakup penyediaan informasi yang jelas, terbuka, dan mudah diakses kepada masyarakat oleh pemerintah dan lembaga-lembaga publik.

Prinsip Good Governance merujuk pada seperangkat prinsip-prinsip yang mengatur tata kelola atau pengelolaan suatu organisasi, entitas, atau negara dengan baik dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip ini mendefinisikan standar perilaku yang diharapkan dari pemerintah, lembaga publik, dan organisasi lainnya dalam menjalankan tugas mereka. Menurut Ritonga dan Syahrir (2016),

transparansi bukan hanya berbicara masalah data yang dapat dilihat oleh publik, tetapi juga bahwa informasi tersebut dipublikasikan secara tepat waktu. Informasi yang tepat waktu pasti akan membantu masyarakat membuat keputusan tentang penyelenggaraan pemerintahan, terutama tentang pengelolaan keuangan daerah. Nurhayati (2017) menyatakan bahwa transparansi keuangan publik adalah prinsip yang menuntut pemerintah atau lembaga publik untuk menyediakan informasi yang jelas, terbuka, dan mudah diakses tentang pengelolaan keuangan mereka kepada masyarakat. Ini termasuk penyediaan informasi tentang pendapatan, pengeluaran, utang, aset, dan kebijakan fiskal lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak MHS selaku Kepala Desa Garing terkait Transparansi Tata Kelola Keuangan Berbasis Aplikasi Siskeudes:

“...kalau soal transparansi kami dalam tata kelola keuangan itu sudah kami lakukan, terlebih lagi dengan system keuangan desa yang kami lakukan, jadi untuk pelaporan kami itu bisa ditinjau langsung oleh inspektorat pada saat pemeriksaan, jadi kami tinggal lampirkan dilayar monitor, begitupun saat ada LSM atau Ormas yang datang sebagai social control mereka bisa melihat pelaporan keuangan kami langsung dari sistem tersebut, tidak ada yang kami sembunyikan, pastinya tetap transparansi...” (hasil wawancara dengan MHS. Senin 31 Juli 2023).

Lebih lanjut terkait pemberian akses informasi laporan keuangan kepada masyarakat Bapak MHS selaku Kepala Desa Garing memaparkan bahwa:

“...Kami memiliki pendekatan berjenjang untuk memberikan akses informasi laporan keuangan di Desa Garing. Pertama, kami menyediakan salinan laporan keuangan Aplikasi Siskeudes di kantor desa dan mengumumkannya melalui papan pengumuman. Selain itu, setiap akhir tahun, kami mengadakan pertemuan publik untuk menjelaskan secara rinci tentang penggunaan anggaran dan menerima masukan dari masyarakat...” (hasil wawancara dengan MHS. Senin 31 Juli 2023).

Kemudian wawancara di atas dapat digambarkan bahwa pemerintah desa Garing dalam tata kelola keuangannya itu sudah dilakukan transparansi dengan

memanfaatkan aplikasi sistem keuangan desa dan keterbukaan informasi public atas laporan keuangan dapat dilihat pada papan pengumuman.

Terkait aspek transparansi dalam pengelolaan keuangan Desa, RNA selaku Kaur Keuangan Desa Garing mengatakan bahwa:

“Kita tentu terbuka, jadi kami membuat papan informasi yang dipampang didepan kantor desa agar semua elemen masyarakat mengetahui penggunaan dan estimasi dana desa diperuntukkan untuk apa saja. (hasil wawancara dengan RNA. Senin 31 Juli 2023).

Dari kutipan yang telah disampaikan tersebut, dapat diketahui bahwa Pengelolaan keuangan Desa Garing jelas sesuai dengan prinsip transparansi, yang memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka tentang bagaimana pemerintah mengelola sumber daya.

Mengenai pertanggungjawaban penggunaan aplikasi Siskeudes dalam penyusunan laporan keuangan desa, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu RNA selaku Kaur Keuangan Desa Garing.

“...Dalam penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi Siskeudes, tugas tersebut adalah tanggung jawab dari Bagian Keuangan di kantor desa. Bagian Keuangan ini dipimpin oleh Bendahara Desa dan dibantu oleh staf atau petugas keuangan lainnya. Prosesnya dimulai dengan mengumpulkan semua data dan transaksi keuangan yang terjadi di desa, seperti pemasukan dan pengeluaran. Setelah itu, data tersebut dimasukkan ke dalam sistem aplikasi Siskeudes. Biasanya, aplikasi ini memiliki berbagai modul yang memungkinkan kami mengelola data keuangan dengan lebih efisien, termasuk modul anggaran, pembukuan, dan pelaporan. (hasil wawancara dengan RNA. Senin 31 Juli 2023)..

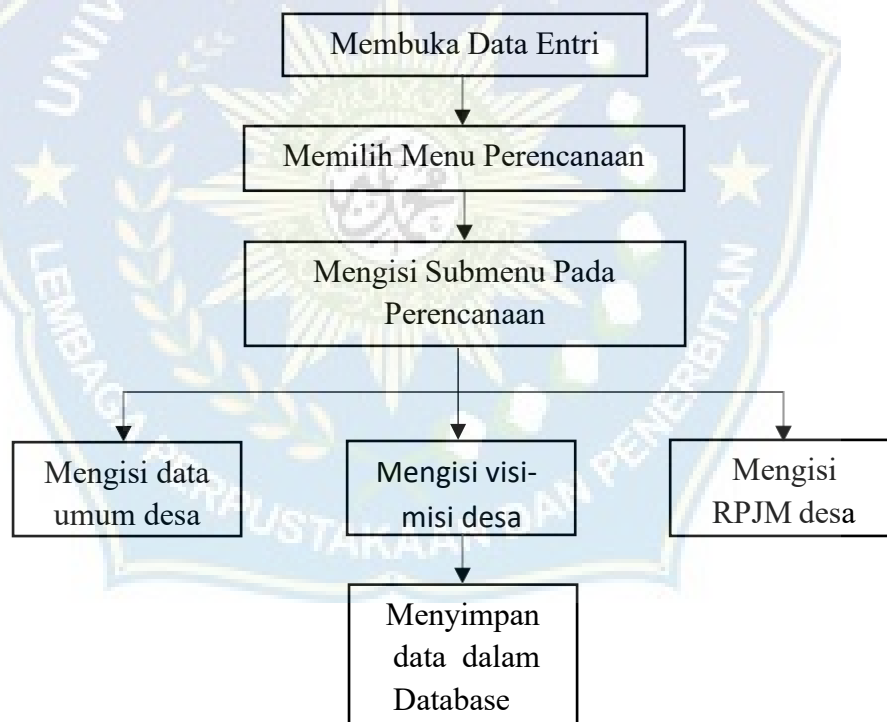
Adapun terkait pemanfaatan aplikasi Siskeudes, Ibu RNA selaku Kaur Keuangan Desa Garing memberikan keterangan bahwa:

“Aplikasi siskeudes ini dimulai tahun 2016 ye, di sini aplikasi siskeudesnya sangat baik. Tabe, karena prosesnya teratuki dari perencanaannya, penganggaran, penatausahaan dan dipelaporan. Kehadirnya aplikasi ini nah bantu sekaliki mengurangi kesalahan.

Sebelum adanya aplikasi Siskeudes, kami biasa adakan pelatiha supaya pahamki terkait penggunaannya aplikasi. (hasil wawancara dengan RNA. Senin 31 Juli 2023).

Dari kutipan tersebut, menunjukkan bahwa Aplikasi Siskeudes bisa berdampak dan jaminan atas efektifitas pelaporan keuangan. Pengelola aplikasi di Desa Garing, merasakan dampaknya dari adanya aplikasi Siskeudes untuk mengatur keuangan desa. Sehingga, aplikasi Siskeudes di Desa Garing diterima karena mereka meyakini bahwa aplikasi ini berkontribusi terhadap pemerintah desa.

Berikut ini alur pengelolaan keuangan desa dalam aplikasi siskeudes.



Gambar 4. 1 Perencanaan Pengelolaan Keuangan Dalam Aplikasi Siskeudes

Kemudian terkait pelibatan masyarakat dalam laporan keuangan Siskeudes, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak TSM selaku Sekretaris Desa Garing.

“...Respons masyarakat cukup positif. Mereka merasa bahwa penggunaan aplikasi ini memberikan transparansi dan akuntabilitas lebih dalam pengelolaan dana desa. Masyarakat bisa melihat dengan lebih mudah bagaimana dana desa digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Namun, tentu saja, ada juga masyarakat yang perlu bimbingan lebih lanjut dalam mengakses informasi ini secara digital...” (hasil wawancara dengan TSM. Rabu 02 Agustus 2023).

Lebih lanjut Bapak TSM selaku Sekretaris Desa Garing menjelaskan terkait partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dan peninjauan laporan keuangan melalui aplikasi Siskeudes.

“...Kami berusaha melibatkan masyarakat dengan beberapa cara. Pertama-tama, kami mengadakan sosialisasi tentang penggunaan aplikasi Siskeudes di acara-acara seperti musyawarah desa atau pertemuan komunitas. Kami menjelaskan bagaimana masyarakat dapat mengakses laporan keuangan dan memberikan pemahaman tentang data yang terdapat dalam laporan tersebut. Selain itu, kami juga membuka sesi tanya jawab untuk membantu masyarakat memahami informasi lebih baik...” (hasil wawancara dengan TSM. Rabu 02 Agustus 2023).

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa pemerintah desa Garing dalam pelaporan keuangan aplikasi Siskeudes telah melibatkan masyarakat dan mendapat respon positif oleh masyarakat serta telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan aplikasi Siskeudes.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas merupakan prinsip dalam suatu perusahaan bahkan pemerintahan wajib menjalankan amanah dalam menjalankan kinerjanya secara bertanggungjawab. Makanya pemerintah perlu dimanagement dengan baik sesuai dengan kaidah yang berlaku. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa merujuk pada tanggung jawab dan kewajiban pihak-pihak terkait, terutama aparatur desa dan kepala desa, dalam memastikan bahwa pengelolaan dana publik desa dilakukan secara transparan, jujur, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang

berlaku. Akuntabilitas ini melibatkan pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa kepada masyarakat, pemerintah, dan instansi terkait.

Sesuai dengan penjelasan diatas dalam pengelolaan keuangan berbasis aplikasi Siskeudes harus dilakukan secara transparan, jujur, efisien, dan sesuai dengan aturan tentang pengelolaan Siskeudes. Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan bapak MHS selaku Kepala Desa Garing.

“...Pastinya aplikasi Siskeudes memberikan manfaat besar dalam meningkatkan akuntabilitas. Dengan aplikasi ini, seluruh proses keuangan desa, mulai dari anggaran, penerimaan, hingga pengeluaran, dapat terdokumentasi dengan rapi dan transparan. Data yang dimasukkan ke dalam aplikasi juga dapat diakses oleh masyarakat, memungkinkan mereka untuk mengawasi dan memastikan bahwa dana desa digunakan dengan tepat...” (hasil wawancara dengan MHS. Senin 31 Juli 2023).

Jadi aplikasi Siskeudes memberikan manfaat besar dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Desa Garing. Lebih lanjut bapak MHS menerangkan bahwa:

“Menurut pendapat saya, penyusunan laporan keuangan didesa kami menunjukkan asas akuntabel, yang menunjukkan bahwa pemerintah desa bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuanganta didesa dari sisi akuntabilitas fiskal. Namun, akuntabilitas sosialnya mencakup tindakan yang melibatkan warga, didukung oleh dokumen terkait, dan dilakukan sesuai dengan SOP yang ditentukan (hasil wawancara dengan MHS. Senin 31 Juli 2023)

Dari pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh Bapak TSM selaku Sekretaris Desa Garing, Pengelolaan keuangan Desa Garing telah dilakukan sesuai sudah d asas akuntabel, yang berarti bahwa setiap action dari kinerja lembaga atau pemerintah dapat mempertanggungjawabkan terhadap lembaga yang memiliki wewenang untuk dipertanggungjawabkan sesuai dengan asas akuntabel.

Adapun terkait kinerja aparatur desa dalam penggunaan aplikasi Siskeudes, peneliti lebih lanjut melakukan wawancara dengan bapak SBD selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

“...Penggunaan aplikasi Siskeudes telah membantu meningkatkan kinerja aparatur desa dalam pengelolaan keuangan. Tim keuangan desa kami telah dilatih untuk menggunakan aplikasi ini dengan baik, sehingga mereka dapat mengelola data keuangan dengan lebih efisien dan akurat. Aplikasi ini membantu mengurangi risiko kesalahan pembukuan manual dan memudahkan proses penyusunan laporan keuangan secara real-time...” (hasil wawancara dengan SBD. Rabu 02 Agustus 2023).

Kemudian bapak SBD selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjelaskan terkait kinerja aparatur desa dalam penggunaan aplikasi Siskeudes.

“...Ya, kinerja aparatur desa telah meningkat dengan adanya aplikasi Siskeudes. Aplikasi ini memungkinkan kami untuk melacak dan mengelola anggaran dengan lebih baik. Pengeluaran dan pemasukan dapat tercatat dengan rapi. Ini membantu kami dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan memudahkan komunikasi dengan masyarakat terkait pengelolaan dana desa...” (hasil wawancara dengan SBD. Rabu 02 Agustus 2023).

Selanjutnya terkait kelebihan dan kekurangan atau tantangan dalam penggunaan aplikasi SISKEUDES peneliti melakukan wawancara dengan Ibu RNA selaku Kaur Keuangan Desa Garing

“...Tentu, aplikasi SISKEUDES memberikan sejumlah kelebihan yang signifikan dalam pengelolaan dana desa. Pertama-tama, kelebihan yang paling mencolok adalah meningkatkan transparansi. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk melihat dan memantau secara real-time bagaimana dana desa digunakan. Namun, seperti halnya dengan teknologi lainnya, aplikasi ini juga ada kekurangannya. kayak keterbatasan aksesibilitas bagi sebagian warga, terutama mereka yang tidak terbiasa menggunakan teknologi. Ini dapat mengurangi efektivitas dalam memberikan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, terkadang ada kendala teknis, seperti masalah koneksi internet yang dapat memperlambat proses input data...” (hasil wawancara dengan RNA. Senin 31 Juli 2023).

Selain tantangan teknis, hambatan lain yang ditemui adalah resistensi terhadap perubahan oleh masyarakat, sesuai wawancara peneliti dengan TSM selaku Sekretaris Desa Garing.

“...Tentu, ada beberapa tantangan. Salah satu tantangannya adalah tingkat literasi digital. Meskipun sebagian besar masyarakat kini memiliki ponsel pintar, tidak semua dari mereka terbiasa dengan teknologi dan memahami cara menggunakan aplikasi. Kami berusaha untuk memberikan pelatihan singkat kepada warga yang membutuhkan agar mereka bisa memanfaatkan aplikasi ini secara maksimal. Beberapa warga mungkin merasa tidak nyaman atau enggan menggunakan teknologi baru, terutama mereka yang sudah terbiasa dengan cara lama. Kami berusaha untuk memberikan pemahaman dan dukungan lebih kepada mereka untuk meyakinkan bahwa perubahan ini akan memberikan manfaat lebih besar bagi desa. (hasil wawancara dengan TSM. Rabu 02 Agustus 2023)

Berdasarkan uraian hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi Siskeudes dalam pelaporan keuangan di Desa Garing sangat sesuai dan merupakan perwujudan asas akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban pemerintah didesa dalam pengelolaan keuangan desa secara fiskal. Adapun akuntabilitas secara sosialnya yaitu pemerintah desa melakukan kegiatan-kegiatan dengan melibatkan unsur masyarakat sesuai SOP yang ditentukan.

Penggunaan aplikasi Siskeudes ini memiliki sejumlah kelebihan yang signifikan dalam pengelolaan dana desa terutama yaitu adalah meningkatkan transparansi karena aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk melihat dan memantau secara *real-time* bagaimana dana desa digunakan. Adapun kekurangannya yaitu salah satunya adalah keterbatasan aksesibilitas bagi sebagian warga dan juga terkadang ada kendala teknis seperti masalah koneksi internet.

3. Partisipasi (*Participation*)

Partisipasi (*Participation*), partisipasi individu dalam proses suatu agenda pengambilan dalam keputusan melalui lembaga yang dapat mewakili keinginan mereka. Partisipasi ini dioerientasikan berdasarkan kebebasan berbicara, asosiasi, dan berhak berpartisipasi secara konseptif.

Selaras yang dijelaskan diatas dalam penyusunan mengelola keuangan desa berbasis Siskeudes diharuskan terbuka untuk seluruh masyarakat, dengan dibangun atas dasar kebebasan berpendapat sesuai denga pembahasan secara tupoksi.

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan MSD yang merupakan kepala Dusun Bontobiraeng

“...Ya, saya pernah diundang dalam pertemuan maupun sosialisasi. Selain itu, pernah ada sesi pelatihan khusus bagi warga yang merasa perlu bimbingan lebih lanjut terkait penggunaan aplikasi ini. Pemerintah desa Garing juga mendistribusikan materi informasi tentang aplikasi Siskudes kepada warga agar mereka dapat memahami manfaatnya...” (hasil wawancara dengan MSD. Minggu 06 Agustus 2023).

Adapun terkait tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung adanya penggunaan aplikasi Siskudes di Desa Garing, peneliti melakukan wawancara dengan bapak MKM sebagai perwakilan dari tokoh masyarakat di Desa Garing.

“...Saya melihat penggunaan aplikasi Siskeudes ini sebagai langkah positif dalam meningkatkan transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Ini sangat membantu karena alat yang dapat membantu masyarakat memahami dan mengawasi bagaimana dana desa digunakan, sehingga dapat menghindari praktik-praktik yang tidak transparan. Kami, sebagai tokoh masyarakat, telah berupaya aktif mendukung penggunaan aplikasi Siskeudes. Perubahan ini memerlukan dukungan dan pemahaman dari semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, sebagai tokoh masyarakat kami telah berkomunikasi dengan warga dan memberikan penjelasan tentang manfaat aplikasi ini. Kami juga memberikan contoh positif dengan menggunakan aplikasi ini secara aktif dan berbagi pengalaman positif kepada warga lainnya...” (hasil wawancara dengan MKM. Minggu 06 Agustus 2023).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu RNA selaku Kaur Keuangan Desa Garing terkait partisipasi perangkat Desa dalam mengelola aplikasi Siskeudes di Desa Garing.

“...Peran kami sebagai perangkat desa dalam pengelolaan aplikasi Siskeudes sangat penting. Kami adalah bagian dari tim yang bertanggung jawab untuk memasukkan data keuangan desa, mengelola anggaran, dan menyusun laporan keuangan secara sistematis melalui aplikasi ini. Kami memastikan bahwa setiap transaksi keuangan desa dicatat secara akurat dan terperinci ke dalam aplikasi. Ini termasuk penerimaan dan pengeluaran dana. Kami juga melibatkan pihak terkait dalam mengesahkan dan memvalidasi data yang dimasukkan. Dengan adanya sistem ini, setiap warga dapat melihat bagaimana dana desa digunakan dengan detail yang jelas. Kami berharap masyarakat dapat semakin aktif dalam memberikan masukan, memantau penggunaan dana desa, dan memberikan saran untuk perbaikan. Semakin banyak warga yang menggunakan aplikasi ini, semakin transparan pengelolaan dana desa akan menjadi...” (hasil wawancara dengan RNA. Senin 31 Juli 2023).

Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan Ibu SMN yang berasal dari masyarakat Desa Garing.

“...Sosialisasi mengenai penggunaan aplikasi SISKUDES di Desa Garing merupakan langkah yang sangat positif. Saya percaya bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat bisa memberi pengetahuan yang lebih bagus dalam pengelolaan dana desa. Ya, ada banyak hal baru yang saya pelajari dari sosialisasi ini. Saya sekarang lebih memahami bagaimana dana desa dialokasikan dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Saya juga tahu cara mengakses informasi keuangan desa melalui aplikasi ini. Yang paling penting, saya merasa bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa semakin ditingkatkan melalui transparansi ini...” (hasil wawancara dengan SMN. Sabtu 12 Agustus 2023).

Berdasarkan uraian hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa penggunaan aplikasi Siskeudes di desa Garing telah melibatkan seluruh elemen masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat sangat mendukung adanya penggunaan aplikasi Siskeudes di desa Garing. Adapun terkait pelibatan masyarakat dalam sosialisasi juga telah dilakukan dan diharapkan penggunaan

aplikasi Siskeudes ini dapat terus memperkuat partisipasi dan transparansi dalam pemanfaatan dana desa di desa Garing.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat

Selanjutnya terkait factor pendukung dalam penggunaan aplikasi SISKEUDES peneliti melakukan wawancara dengan Ibu RNA selaku Kaur Keuangan Desa Garing.

“...Tentu, aplikasi SISKEUDES memberikan sejumlah kelebihan yang signifikan dalam pengelolaan dana desa. Pertama-tama, kelebihan yang paling mencolok adalah meningkatkan transparansi. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk melihat dan memantau secara real-time bagaimana dana desa digunakan. Namun, seperti halnya dengan teknologi lainnya, aplikasi ini memiliki kekurangan. Seperti keterbatasan aksesibilitas bagi sebagian warga, terutama mereka yang tidak terbiasa menggunakan teknologi. Ini dapat mengurangi efektivitas dalam memberikan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, terkadang ada kendala teknis, seperti masalah koneksi internet yang dapat memperlambat proses input data...” (hasil wawancara dengan RNA. Senin 31 Juli 2023).

Selain tantangan teknis, hambatan lain yang ditemui adalah resistensi terhadap perubahan oleh masyarakat, sesuai wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak TSM selaku Sekretaris Desa Garing.

“...Tentu, ada beberapa tantangan. Salah satu tantangannya adalah tingkat literasi digital. Meskipun sebagian besar masyarakat kini memiliki ponsel pintar, tidak semua dari mereka terbiasa dengan teknologi dan memahami cara menggunakan aplikasi. Kami berusaha untuk memberikan pelatihan singkat kepada warga yang membutuhkan agar mereka bisa memanfaatkan aplikasi ini secara maksimal. Beberapa warga mungkin merasa tidak nyaman atau enggan menggunakan teknologi baru, terutama mereka yang sudah terbiasa dengan cara lama. Kami berusaha untuk memberikan pemahaman dan dukungan lebih kepada mereka untuk meyakinkan bahwa perubahan ini akan memberikan manfaat lebih besar bagi desa. (hasil wawancara dengan TSM. Rabu 02 Agustus 2023).

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Pengelolaan Keuangan Desa, semua berhak dan berkewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dianggap sebagai keuangan desa, dan itu bisa dibandingkan dengan uang, termasuk dalam bentuk kekayaan yang berkaitan atas hak dan kewajiban desa.

Namun, pengelolaan keuangan desa merupakan subsistem dari sistem manajemen keuangan negara dan daerah untuk membiayai pemerintahan ditingkat desa dan memberdayakan masyarakat. Ini mencakup semua agenda yang termasuk perencanaan, anggaran, penatausahaan, laporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

Dalam penelitian ini digunakan indikator *Good Government Governance* Mahsun dkk (Marliana, 2019) yaitu :

1. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi, menurut Mahmudi (2016:17), mengacu pada keadaan di mana suatu organisasi menjadi transparan dalam hal memberikan informasi kepada pemangku kepentingan terkait operasi pengelolaan sumber daya publik.

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang membuat orang bisa tahu dan memiliki jalan untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya keuangan didaerah. Transparansi menjamin bahwa tiap-tiap orang berhak mendapat akses atau kebebasan untuk memperoleh information tentang sistem pemerintahan, seperti informasi kebijakan, pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil dari proses tersebut.

Proses pertanggungjawaban yang sudah dilaksanakan secara terbuka membantu pemerintah Desa Garing menjadi lebih transparan dalam pengelolaan keuangan desa berbasis Aplikasi Siskeudes. Adanya spanduk informasi dan pembagiannya kepada RT/RW sebagai wakil masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat dapat mendapatkan informasi.

Sebagaimana dijelaskan oleh Purwanto dan Sulistyastuti (2015), goals dari didapkannya informasi supaya sasaran kebijakan memahami arti dari kebijakan. Agar mereka bisa menjalankan program pemerintah dan aktif terlibat dalam menggapai tujuan kebijakan. Semua orang tahu bahwa sebagai bagian dari pemerintah desa, pemerintah desa bertanggung jawab atas keuangan desa.

Sejalan dengan pengertian World Bank (Bank Dunia) yang memberi pengertian bahwa transparansi adalah pemberian aliran informasi yang jelas, terbuka, dan mudah diakses dari pemerintah kepada masyarakat atau kepada sektor-sektor lain, yang memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan, program, anggaran, dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Robert Behn (dalam Amir N. Licht, 2002) memberi pengertian akuntabilitas sebagai kewajiban untuk menjelaskan, memberikan pertanggungjawaban, dan menanggung konsekuensi dari keputusan, tindakan, dan perilaku.

Akuntabilitas adalah ketika orang-orang yang dapat dipercaya oleh masyarakat bertanggung jawab atas sukses atau tidaknya mereka dalam melaksanakan tanggung jawab mereka untuk menggapai tujuan.

"Akuntabilitas adalah prinsip yang menuntut individu, organisasi, atau lembaga untuk bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan kewajiban mereka kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau pemangku kepentingan lainnya. Hal ini melibatkan kewajiban untuk menjelaskan, memberikan pertanggungjawaban, dan menghadapi konsekuensi dari tindakan atau keputusan yang diambil ", kata Penny Kusumastuti (2014:2).

Pertanggungjawaban ini berkaitan dengan tindakan birokrat yang melayani sebagai tanggapan atas hak masyarakat. Pertanggungjawaban harus dilakukan melalui sosial media, yang kemudian dapat informasikan secara teratur dan tak terduga kepada pihak internal maupun eksternal (publik).

Tujuan utama dari penerapan SISKEUDES adalah agar pemerintah desa lebih mudah mengelola keuangan dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Penyusunan laporan keuangan desa dalam aplikasi siskeudes menunjukkan asas akuntabel; ini menunjukkan bahwa pemerintah desa bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa dari sisi akuntabilitas fiskal. Namun, akuntabilitas secara sosial mencakup tindakan yang melibatkan warga serta dukungan dari dokumen terkait selaras dengan prosedur. Jadi, desa memiliki peran penting dalam membantu pemerintah daerah menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan dan memenuhi prinsip

transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan saat ini (Artini dkk., 2017).

Penggunaan aplikasi Siskeudes pada pelaporan keuangan di Desa Garing sangat sesuai dan merupakan perwujudan asas akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa secara fiskal. Adapun akuntabilitas secara hemat sosialnya yaitu pemerintah desa melakukan kegiatan-kegiatan dengan melibatkan unsur masyarakat selaras dengan prosedur yang disepakati.

Penggunaan aplikasi Siskeudes ini memiliki sejumlah kelebihan yang signifikan dalam pengelolaan dana desa terutama yaitu adalah meningkatkan transparansi karena aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk melihat dan memantau secara real-time bagaimana dana desa digunakan. Adapun kekurangannya yaitu salah satunya adalah keterbatasan aksesibilitas bagi sebagian warga dan juga terkadang ada kendala teknis seperti masalah koneksi internet.

3. Partisipasi (*Participation*)

Partisipasi merupakan seseorang yang melibatkan diri pada proses pengambilan keputusan melalui kelembagaan agar dapat menyampaikan keluhannya. Partisipasi mengacu pada terlibatnya unsur individu atau kelompok dalam upaya pengambilan keputusan, perencanaan, implementation, dan evaluasi program atau proyek yang mempengaruhi mereka. Ini termasuk berkolaborasi, berkolaborasi, memberikan suara, dan berkontribusi pada proses yang relevan. Menurut Bornby (dalam Theresia et al., 2015:196), partisipasi

dapat didefinisikan sebagai langkah strategis untuk terlibat dalam suatu agenda atau tindakan untuk mengambil peran untuk memperoleh manfaat.

Dalam penggunaan aplikasi Siskeudes di desa Garing telah melibatkan seluruh elemen masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat sangat mendukung adanya penggunaan aplikasi Siskeudes di desa Garing. Adapun terkait pelibatan masyarakat dalam sosialisasi juga telah dilakukan dan diharapkan penggunaan aplikasi Siskeudes ini dapat terus memperkuat partisipasi dan transparansi dalam pengelolaan dana desa di desa Garing.

Sesuai dengan pendapat Amartya Sen (Michael P.Todaro, 2003:25), partisipasi adalah suatu proses di mana individu memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam penentuan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka sendiri.

Berikut disajikan dalam Tabel 4.2 matriks pembahasan hasil penelitian dalam kaitannya dengan indikator penelitian yang digunakan peneliti yaitu Good Government Governance Mahsun dkk (Marliana, 2019) sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Matriks Hasil Penelitian

No.	Pembahasan Hasil Penelitian	Relevansi Teori/Penelitian
1.	<p>Indikator Transparansi diwujudkan dengan Pemerintah desa Garing pada pelaporan keuangan aplikasi Siskeudes telah melibatkan masyarakat dan mendapat respon positif serta telah dilakukan sosialisasi terkait penggunaan aplikasi Siskeudes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Transparansi, menurut Mahmudi (2016:17), berarti keterbukaan organisasi dalam memberikan pemangku kepentingan informasi tentang pengelolaan sumber daya publik. ➤ Tujuan pemberian informasi, menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2015),

		adalah untuk membantu kelompok sasaran memahami kebijakan yang akan diterapkan
2.	<p>Indikator Akuntabilitas dalam aplikasi Siskeudes pada pelaporan keuangan di Desa Garing yaitu pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa secara fiskal. Adapun akuntabilitas secara sosialnya yaitu pemerintah desa melakukan kegiatan-kegiatan dengan melibatkan unsur masyarakat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Robert Behn (dalam Amir N. Licht, 2002) memberi pengertian akuntabilitas sebagai kewajiban untuk menjelaskan, memberikan pertanggungjawaban, dan menanggung konsekuensi dari keputusan, tindakan, dan perilaku. ➤ Menurut Penny Kusumastuti (2014:2), akuntabilitas berarti bahwa penyelenggaraan kegiatan publik harus bisa mendiskripsikan dan menjawab semua hal yang berkaitan dengan langkah-langkah dari seluruh proses dan keputusan yang dibuat.
3.	<p>Indikator Partisipasi dalam pnggunaan aplikasi Siskeudes di desa Garing telah melibatkan seluruh elemen masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat sangat mendukung adanya penggunaan aplikasi Siskeudes, serta melibatkan masyarakat dalam sosialisasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Amartya Sen (Michael P.Todaro, 2003:25), partisipasi adalah suatu proses di mana individu memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam penentuan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka sendiri. ➤ Menurut Bornby (dalam Theresia et al., 2015:196), partisipasi dapat didefinisikan sebagai mengambil bagian dalam suatu kegiatan atau mengambil peran dalam suatu agenda agar mendapat manfaat.

Sumber: Peneliti (2022)

Peneliti telah memenuhi semua kriteria penelitian, seperti yang ditunjukkan oleh matriks hasil penelitian yang tersedia di tabel 4.2 di atas.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Tata Kelola Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kab. Gowa sudah terimplementasi dengan baik berdasar prinsip Good Government Governance.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tata kelola keuangan Desa berbasis aplikasi Siskeudes didesa Garing Kecamatan Tompobulu Kab. Gowa sudah terimplementasi dengan baik berdasar prinsip *Good Government Governance*.

1. Indikator Transparansi diwujudkan dengan Pemerintah desa Garing pada pelaporan keuangan aplikasi Siskeudes telah melibatkan masyarakat dan mendapat respon positif serta telah dilakukan sosialisasi terkait penggunaan aplikasi Siskeudes.
2. Indikator Akuntabilitas dalam aplikasi Siskeudes pada pelaporan keuangan di Desa Garing yaitu pertanggungjawaban pemerintah desa saat pengelolaan keuangan desa secara fiskal. Adapun akuntabilitas dalam sosialnya yaitu pemerintah desa melakukan kegiatan-kegiatan dengan melibatkan unsur masyarakat.
3. Indikator Partisipasi dalam penggunaan aplikasi Siskeudes di desa Garing telah melibatkan seluruh elemen masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat sangat mendukung adanya penggunaan aplikasi Siskeudes, serta melibatkan masyarakat dalam sosialisasi.
4. Faktor pendukung penggunaan aplikasi ini yaitu memungkinkan masyarakat untuk melihat dan memantau secara real-time bagaimana dana desa digunakan. Namun, seperti halnya dengan teknologi lainnya, aplikasi ini juga memiliki beberapa kekurangan.

Salah satunya adalah keterbatasan aksesibilitas bagi sebagian warga, terutama mereka yang tidak terbiasa menggunakan teknologi. Ini dapat mengurangi efektivitas dalam memberikan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

B. Saran

Adapun saran penelitian ini terkait tata kelola keuangan Desa berbasis aplikasi Siskeudes di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kab. Gowa sebagai berikut:

1. Diharapkan adanya pelatihan reguler kepada petugas Desa yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan menggunakan aplikasi Siskeudes. Pastikan mereka memahami cara menggunakan aplikasi dengan baik.
2. Melibatkan masyarakat dalam pelatihan juga penting agar mereka dapat memahami bagaimana alokasi dana Desa dilakukan dan bagaimana mereka bisa mengakses informasi terkait.
3. Publikasikan laporan keuangan dan anggaran Desa secara rutin melalui situs web Desa, papan pengumuman, atau media sosial. Pastikan informasi tersebut mudah diakses oleh masyarakat.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi basis untuk penelitian lebih mendalam tentang efektivitas kebijakan pengelolaan keuangan Desa, dampaknya terhadap pembangunan, serta perbandingan dengan Desa lain atau tahun sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agunguannto, E. Y., Arianti, F., & Darwanto. (2016). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). *Jdeb*, 13(1).
- Aprillia, F. (2021). Penanganan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Melalui Pengembangan Kerja Sama Untuk Meningkatkan Usaha Desa Di Desa Torgamba Labuhan Batu Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial Dan Politik [Jimsipol]*, 1(3).
[Http://Jurnalmahasiswa.Umsu.Ac.Id/Index.Php/Jimsipol/Article/View/476](http://Jurnalmahasiswa.Umsu.Ac.Id/Index.Php/Jimsipol/Article/View/476)
- Barniat, Z. (2019). Otonomi Desa : Konsepsi Teoritis Dan. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 5(1).
- Dhyni. (N.D.). *Kpk Puji Siskeudes Gowa*. Humas Pemkab Gowa, Dinas Komnikasi Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Gowa.
- Fahrizal, M. G. (2018). Evaluasi Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Kedungmaling Dan Desa Kunitir Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 6(1).
- Finambelo, F. T. . (2020). Evaluasi Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Guna Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Kapuas [Universitas Tribhuwana Tungadewi]. In *Applied Microbiology And Biotechnology* (Vol. 2507, Issue 1).
<https://doi.org/10.1016/j.solener.2019.02.027>
<https://www.golder.com/insights/block-caving-a-viable-alternative/>
- Hayati, R. (2021). Efektifitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) (Siskeudes) Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong. *Jurnal Pubbis*, 5(2). <https://doi.org/10.35722/pubbis.v5i2.450>
- I Nyoman Sutapa, K. A. K. S. P. B. A. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Perspektif Budaya Tri Hita Karana. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1).
<https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.90>
- Indrianti, R., Herman, M., & Fibriyanita, F. (2020). *Dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Kertak Empat*. Universitas Islam Kalimantan Mab Banjarmasin.
- Kereh, E. D., Morasa, J., & Mawikere, L. (2022). Evaluasi Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Taraitak Satu Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa) Evaluation Of The Use Of The Village Financial System (Siskeudes) In Village Gover. *Jurnal Lppm*, 5(2).

- Kristina Korniti Kila. (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. *Ejournal Administrasi Negara*, 3(4), 505–519.
- Mamuaya, J. V., Sabijono, H., & Gamaliel, H. (2017). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). *Jurnal Emba*, 5(2).
- Marliana, E. (2019). *Pengaruh Good Government Governance, Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Studi Kasus Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta)*. Universitas Komputer Indonesia Bandung.
- Mooduto, W. I. S. (2020). Evaluasi Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Kecamatan Kabila. *Journal Of Economic, Business, And Administration (Jeba)*, 1(1). <https://doi.org/10.47918/V1i1.8>
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Wonosobo. *Journal Of Economic, Management, Accounting And Technology*, 3(2). <https://doi.org/10.32500/Jematech.V3i2.1283>
- Norliani, R., Harahap, A., & Suryani, E. (2020). Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Nalui Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong. *Japb*, 3(3).
- Nur Wijayanti, S. (2017). Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum*, 23(2). <https://doi.org/10.18196/Jmh.2016.0079.186-199>
- Pernando, E. J., Sunah, M. D. Al, & Qadarsih, A. M. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Bidang Kesehatan Di Wilayah Kerja Puskesmas Rawang. *Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa*, 3(6), 369–377.
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/Alhadharah.V17i33.2374>
- Risnawati, D. (2017). Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 199–212. [Ejournal.Ip.Fisip-Unmul.Ac.Id](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id)
- Rivan, Arif & Maksum, I. R. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, Vol. 9(2). <https://ojs.uma.ac.id/index.php/Adminpublik/Article/View/2487>

Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1).
<https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16>

Wijaya, E., & Roni, M. F. (2019). Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya (Practice Of Village Fund Management And Its Affecting Factors). *Jkih*, 13(2).

Wonok, G. R. . (2020). Strategi Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) (Studi Di Desa Mokobang Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan) Oleh. *Jurnal Ilmu Politik*, 9(1).

Zulkarnaen, W., Dewi Fitriani, I., Sasangka, I., & Muhammadiyah Bandung, S. (2021). Model Tata Kelola Amal Usaha Muhammadiyah Berbasis Sistem Informasi Manajemen Di Wilayah Pdm Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(1), 63–78.

<http://www.journal.stiemb.ac.id/index.php/Mea/article/view/687>



L

A

M

P

I

R

A

N



LAMPIRAN 1: MATRIKS INSTRUMEN PENELITIAN

TATA KELOLA KEUANGAN DESA BERBASIS APLIKASI SISKUDES DI DESA GARING KECAMATAN TOMPOBULU KAB. GOWA

No	Fokus Masalah	Indikator	Pertanyaan Penelitian	Informan	Keterangan
A	Tata kelola keuangan Desa berbasis aplikasi SISKUDES di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa	1. Trasnparansi (<i>Trasnparency</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana keterbukaan informasi public aparat desa dalam memberikan data laporan keuangan kepada masyarakat? 2. Siapakah yang bertanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan tersebut dengan menggunakan aplikasi SISKUDES? 3. Apakah pelaporan keuangan desa selalu melibatkan masyarakat? 4. Bagaimanakah respon tokoh masyarakat pada saat adanya penyampaian atau pembahasan laporan keuangan Desa dengan menggunakan SISKUDES? 5. Apakah sebelumnya ada sosialisasi kepada masyarakat mengenai adanya penggunaan aplikasi keuangan berbasis teknologi yaitu SISKUDES? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa 2. Ketua BPD 3. Kaur keungan 4. Staf keungan 5. Tokoh masyarakat 	


No	Fokus Masalah	Indikator	Pertanyaan Penelitian	Informan	Keterangan
		2. Akuntabilitas (<i>Accountability</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kinerja aparatur desa dalam penggunaan aplikasi SISKUDES? 2. Apakah dengan adanya aplikasi SISKUDES kinerja aparatur desa menjadi meningkat? 3. Apa kekurangan aplikasi SISKUDES bagi aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa? 4. Sejauh mana kelebihan dalam menggunakan aplikasi SISKUDES untuk mengelolan pelaporan keuangan Desa? 5. Apa hambatan dalam menggunakan aplikasi SISKUDES dalam pengelolaan laporan keuangan Desa? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa 2. Ketua BPD 3. Kaur keungan 4. Staf keungan 5. Tokoh masyarakat 	
		3. Partisipasi (<i>Participation</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah dalam pengadaan aplikasi SISKDES di Desa seluruh elemen dilibatkan? 2. Bagaimana tingkat partisipasi Tokoh masyarakat dalam mendukung adanya penggunaan aplikasi SISKUDES di Desa Garing? 3. Apakah ada batasan dalam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa 2. Ketua BPD 3. Kaur keungan 4. Staf keungan 5. Tokoh masyarakat 	

No	Fokus Masalah	Indikator	Pertanyaan Penelitian	Informan	Keterangan
			<p>mengakses aplikasi SISKUDES untuk mengetahui pelaporan keuangan desa/</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Apakah selama penerapan aplikasi SISKUDES tersebut ada pihak yang kurang mendukung? 5. Bagaimanakah partisipasi perangkat Desa dalam mengelola aplikasi SISKUDES di Desa Garing? 		
B.	Faktor Pendukung dan Penghambat Tata kelola keuangan Desa berbasis aplikasi SISKUDES di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa	1. Faktor Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang menjadi faktor pendukung dalam tata kelola keuangan dengan aplikasi SISKUDES di Desa Garing? 2. Apa langkah-langkah Perangkat Desa yang terlibat dalam memperkuat faktor pendukung tersebut? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa 2. Ketua BPD 3. Kaur keuangan 4. Staf keuangan 5. Tokoh masyarakat 	
		2. Faktor Penghambat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seperti apakah yang menjadi faktor penghambat dalam tata kelola keuangan dengan menggunakan aplikasi SISKUDES di Desa Garing? 2. Apa langkah-langkah Pemerintah Desa beserta perangkat Desa dalam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa 2. Ketua BPD 3. Kaur keuangan 4. Staf keuangan 5. Tokoh masyarakat 	

No	Fokus Masalah	Indikator	Pertanyaan Penelitian	Informan	Keterangan
			megnhalau faktor penghambat tersebut?		



Lampiran 2. Persuratan Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Bougenville No. 5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulseprov.go.id> Email : ptsp@sulseprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 2536/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Gowa
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 402/05/C.4-VIII/III/1444/2023 tanggal 11 Februari 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: NURIFKA INDRANI
Nomor Pokok	: 105641108417
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sit Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" TATA KELOLA KEUANGAN DESA BERBASIS APLIKASI SISKEUDES DI DESA GARING
 KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA "**


Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **14 Februari s/d 14 April 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada Tanggal 14 Februari 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
 Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
 Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



**Universitas
Muhammadiyah
Makassar**
Integrity - Professionalism - Entrepreneurship

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Faculty of Social and Political Sciences

Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221
Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588
Official Email : fisp@unismuh.ac.id
Official Web : <https://fisp.unismuh.ac.id>

Nomor : 0281/FSP/A.6-VIII/II/1444 H/2023 M
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Nurifka Indriani
Stambuk : 105641108417
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : Di Kantor Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.
Judul Skripsi : *"Tata Kelola Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa"*

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar 11 Februari 2023

Dekan,
Ub. Wakil Dekan I



Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si
NBM. 992 797



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 402/05/C.4-VIII/II/1444/2023

20 Rajab 1444 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

11 February 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0281/FSP/A.1-VIII/II/1444H/2023M tanggal 11 Februari 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : NURFIKA INDRIANI

No. Stambuk : 10564 1108417

Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"TATA KELOLA KEUANGAN DESA BERBASIS APLIKASI SISKEUDES DI DESA GARING KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 14 Februari 2023 s/d 14 April 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,





**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
KECAMATAN TOMPOBULU
DESA GARING**

Alamat : Jl. H. Dengge Dg. Gassing No. 2 KP 92175

Nomor : 503.1/DG-KTB/07/V/2023

Lamp. :-

Perihal : Keterangan Selesai Penelitian

Berdasarkan surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 503/200/DPM/PENELITIAN/11/2023 Tanggal 14 Februari 2023 Perihal Rekomendasi Penelitian dan surat Izin dari Pemerintah Desa Garing Nomor 503/DG-KTB/05/IV/2022 pertanggal 07 Maret 2023 kepada yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : NURIFKA INDRIANI
Tempat/Tgl Lahir : Garing, 28 Juli 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Nomor Pokok : 105641108417
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan : Mahasiswa S1
Alamat : Bulueng Desa Garing Kec. Tompobulu Kab. Gowa

Dimana saudara tersebut namanya diatas telah selesai melakukan penelitian dari Tanggal 14 Februari 2023 s/d 14 April 2023 Di Desa Garing Kec. Tompobulu Kab. Gowa untuk penyusunan skripsi/Tesis/Disertasi/Lembaga yang berjudul "*Tata Kelola Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes Di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa*"

Demikian Surat Keterangan ini di buat dan selanjutnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth:

1. Camat Tompobulu di Malakaji
2. Ketua BPD Desa Garing di Garing
3. Pertiagal.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENETAPAN JUDUL SKRIPSI

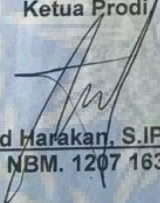
1. Nama Mahasiswa : Nurifka Indriani
2. Nomor Pokok : 105641108417
3. Jurusan : Ilmu Pemerintahan
4. Alamat : Kota Makassar
5. Rencana Judul :

"Sistem Pengelolaan Keuangan Kecamatan Berbasis E-Government di Kecamatan Pallangga Kab. Gowa"

6. Rencana Konsultan
Konsultan I : Rudi Hardi, S.Sos., M.Si
Konsultan II : Nur Khaerah, S.IP., M.IP

Makassar, 29 Juli 2022

Mengetahui,
Ketua Prodi

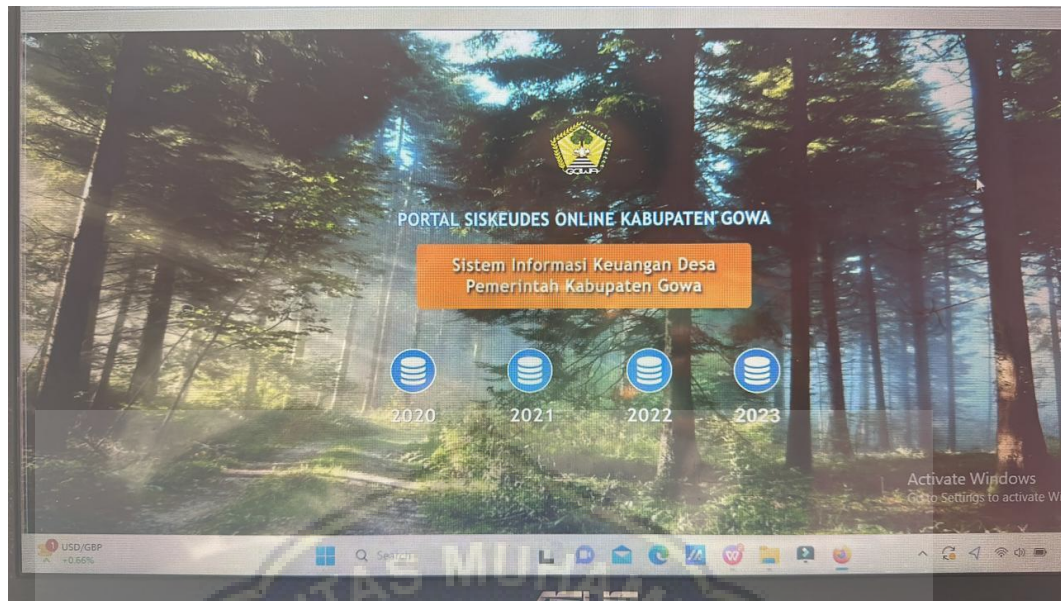

Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I.
NBM. 1207 163

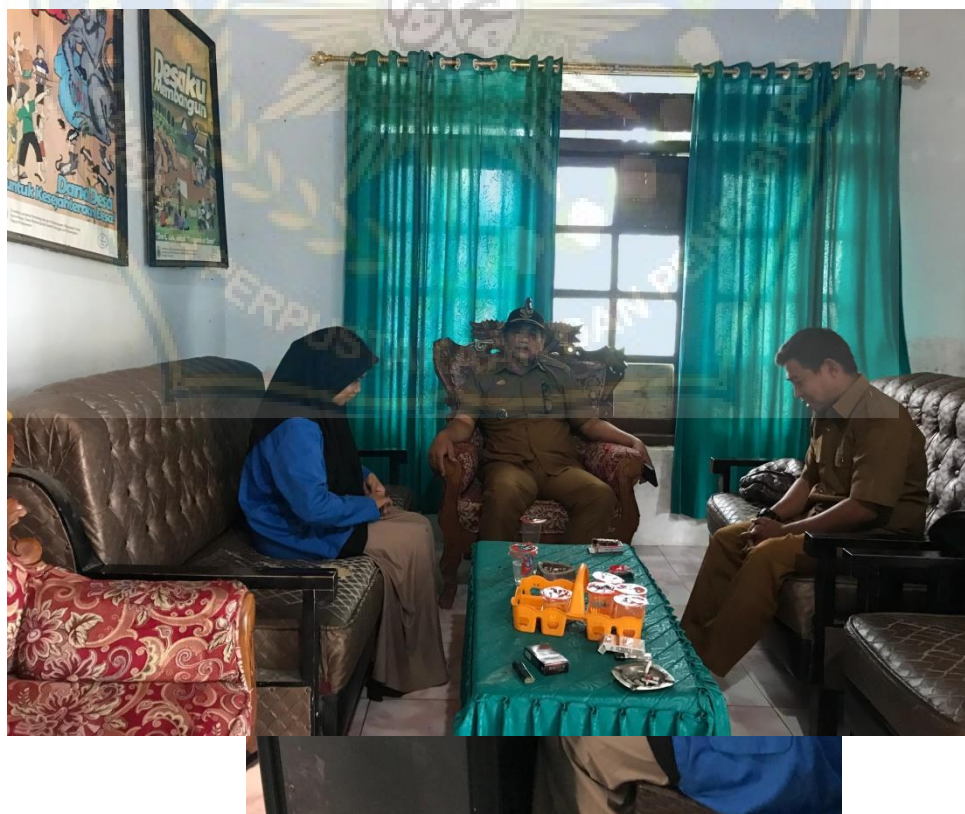
Pemohon,


Nurifka Indriani
NIM. 105641108417

Lampiran 3 Dokumentasi







Lampiran 4 Keterangan bebas Plagiat


MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
 Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588


SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
 Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : nurifka indriani
 Nim : 105641108417
 Program Studi: Ilmu Pemerintahan
 Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8 %	10 %
2	Bab 2	21 %	25 %
3	Bab 3	8%	10 %
4	Bab 4	8 %	10 %
5	Bab 5	3 %	5%

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 17 Februari 2024
 Mengetahui
 Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,

 Nurhidayah H. M.I.P.
 NIM 1064 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
 Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
 Website: www.library.unismuh.ac.id
 E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

Lampiran 5 Bukti Plagiasi

Bab I nurifka indriani 105641108417

ORIGINALITY REPORT

8%	7%	6%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	m.merdeka.com Internet Source	6%
2	core.ac.uk Internet Source	1%
3	Indari Umayah, Arisyahidin Arisyahidin, Nisa Mutiara. "Analisis Peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Akuntabilitas Dan Transparansi Guna Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Desa Di Kabupaten Kediri". Otonomi, 2022 Publication	1%
4	repository.umsu.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes Off Exclude matches Off
Exclude bibliography Off

LULUS
turnitin

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB II nurifka indriani 105641108417

by TAHAP TUTUP



Submission date: 02-Feb-2024 05:02AM (UTC+0300)

Submission ID: 2283927281

File name: Test_BAB_II.docx (79.57K)

Word count: 3244

Character count: 22266

BAB II nurifka indriani 105641108417

ORIGINALITY REPORT

21%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

16%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	media.neliti.com Internet Source	3%
2	stiatabalong.ac.id Internet Source	3%
3	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%
4	eprints.uniska-bjm.ac.id Internet Source	1%
5	ejournal.widyamataram.ac.id Internet Source	1%
6	journal.amikindonesia.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to IAIN Pontianak Student Paper	1%
8	repository.stiedewantara.ac.id Internet Source	1%
9	ejournal.uksw.edu Internet Source	1%

BAB III nurifka indriani 105641108417

by TAHAP TUTUP



Submission date: 02-Feb-2024 06:32AM (UTC+0300)

Submission ID: 2284251172

File name: Test_BAB_III.docx (26.44K)

Word count: 1038

Character count: 6859

BAB III nurifka indriani 105641108417

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

id.scribd.com

Internet Source

2%

2

repository.iainpurwokerto.ac.id

Internet Source

1%

3

repository.uinsu.ac.id

Internet Source

1%

4

repository.uin-suska.ac.id

Internet Source

1%

5

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

1%

6

docplayer.info

Internet Source

1%

7

m.merdeka.com

Internet Source

1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off



BAB IV nurifka indriani 105641108417

by TAHAPA TUTUP



Submission date: 02-Feb-2024 09:05AM (UTC+0300)

Submission ID: 2284367068

File name: BAB_IV.docx (103.46K)

Word count: 3999

Character count: 27431

BAB IV nurifka indriani 105641108417

ORIGINALITY REPORT

8%	7%	1%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	5%
2	www.scribd.com Internet Source	1%
3	Faidhul Mannan, Dairani Dairani, Fathol Bari. "AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA OLEH PEMERINTAHAN DESA SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH", HUKMY : Jurnal Hukum, 2024 Publication	<1%
4	Submitted to Universitas Negeri Makassar Student Paper	<1%
5	Submitted to Universitas Merdeka Malang Student Paper	<1%
6	id.wikipedia.org Internet Source	<1%
7	Agus Wahyudi, Sutjipto Ngumar, Bambang Suryono. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA MANAJERIAL	<1%

BAB V nurifka indriani 105641108417
by TAHAP TUTUP



Submission date: 02-Feb-2024 09:46AM (UTC+0300)

Submission ID: 2284389386

File name: BAB_V.docx (20.28K)

Word count: 302

Character count: 2129

BAB V nurifka indriani - 105641108417

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

3%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches Off



Lampiran 6 Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nurifka Indriani, lahir di Desa Garing Kab Gowa 28 juli 1999, anak ketiga dari pasangan bapak bernama H Makmur, S.pd,I dan ibu yang bernama Hj. ST Nurhayati, S.pd,i. penulis masuk sekolah dasar pada tahun 2005 di SDI Garing tamat pada tahun 2011 masuk menengah pertama SMPN 1 Tompobulu dan tamat 2014, melanjutkan pendidikan sekolah menengah Atas di SMAN Tompobulu dan sekarang bernama SMAN 7 Gowa dan tamat 2017 , kemudian penulis melanjutkan kembali pendidikan pada program sarjana (S1) pada program studi ilmu pemerintahan Fakultas ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis juga aktif di beberapa lembaga internal dan esternal kampus.

Internal

1. Bendahara Umum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) fakultas ilmu social dan ilmu politik priode 2020/2021
2. Sekertaris bidang organisasi himpunan mahasiswa jurusan ilmu pemerintahan (Himjip) fakultas Ilmu social dan ilmu politik priode 2019/2020
3. Bid. Organisasi pimpinan komisariat (pikom) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) fakultas ilmu social dan ilmu politik 2 priode

Eksernal

1. Bendahara umum Himpunan pelajar Mahasiswa (HIPMA) Gowa koord tompobulu 2020/2021
2. Wakil ketua 1 Himpunan Pelajar Mahasiswa (HIPMA) Gowa Komisariat Unismuh 2019/2020
3. Ketua bidang pemberdayaan Perempuan karang taruna Kecamatan Tompobulu 2021/sekarang
4. Ketua umum ikatan pemuda peduli bencana (IPPB) 2022/2023
5. Pengurus Dewan Pengurus Pusat (DPP) himpunan Pelajar Mahasiswa (HIPMA) Gowa 2023/sekarang